

PELANTIKAN 5 KOMISIONER  
KPU LAMPUNG

KPU BERHASIL SELENGGARAKAN  
PEMILU DENGAN SUKSES

EDISI I | OKTOBER 2014

# SUARA KPU

MENJAGA HAK RAKYAT TETAP BERSUARA DALAM PEMILU



**KETUA KPU RI HUSNI KAMIL MANIK:**

# “Perjuangan Belum Selesai”



# Memilih ★ Untuk ★ Indonesia Suara Anda Menentukan ★



## DAFTAR ISI

PELANTIKAN 5 KOMISIONER KPU LAMPUNG | KPU BERHASIL SELenggarakan PEMILU DENGAN SUKSES



s u a r a u t a m a

## “Perjuangan Ini Belum Selesai”

INDONESIA merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Secara umum, Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 berjalan dengan aman, tertib, lancar dan damai.

Halaman 4

## 12 Transparansi Menonjol Dalam Pemilu Kali Ini

Sejak awal, kami ingin publik menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap penyelenggaraan Pemilu. Karena itu, kami memberi akses informasi ke pemilu yang seluas-luasnya kepada publik.

## 20 Menuangkan Cinta Lewat Kritik

Refly Harun bukanlah nama yang asing bagi sementara rakyat Indonesia. Lebih-lebih bagi mereka yang selama ini ikut larut memperhatikan dinamika politik dan ketatanegaraan.

## 22 Pelantikan 5 Komisioner KPU Provinsi Lampung

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik resmi melantik lima anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung periode 2014-2019. Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Lantai 1 Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol No.29, Jakarta Pusat, Rabu (15/10).

15



ASEP WARLAN YUSUF:

## KPU Berhasil Selenggarakan Pemilu dengan Sukses

Proses pemilihan umum terutama penyelenggaraan Pilpres, telah berlangsung secara jujur, adil, damai, aman, demokratis, dan bermartabat.

18



FERRY KURNIA RIZKIYANSYAH

## Perjuangkan Demokrasi Sejak Mahasiswa

Suara KPU kali ini berusaha merekam proses pileg dan pilpres 2014. Tentu tak ketinggalan, evaluasi dari semua proses yang sangat penting untuk disajikan.

28

## KPU RI Apresiasi Kinerja KPU DIY

Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 termasuk dinilai baik.

# Melewati Jalan Terjal Demokrasi

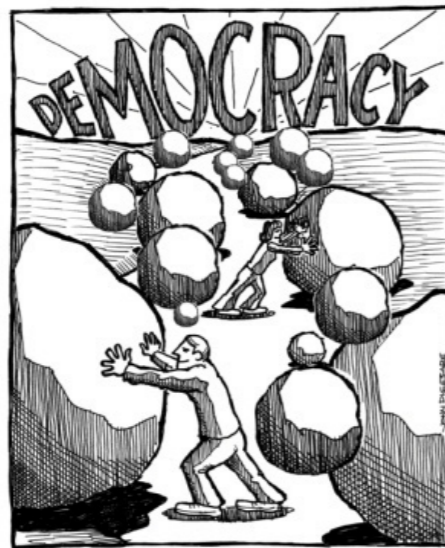
BAGIAN jalan terjal itu telah dilalui. Jalan terjal yang harus dilewati oleh setiap negara yang berada di jalan demokrasi itu bernama pemilihan umum. Di Indonesia, secara nasional, ada dua macam pemilihan, yaitu pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres).

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), ke depan, dalam Pemilu 2019, pileg dan pilpres digelar secara bersamaan. Namun dalam konteks 2014, dengan berbagai pertimbangan MK, pileg dan pilpres masih dilaksanakan terpisah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri, sebagai penyelenggara pemilihan selalu siap melakukan keputusan dan ketentuan UU.

Pileg 2014 pun sudah terlaksana dengan baik pada 9 April. Tentu saja dengan beberapa catatan yang bisa menjadi rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Dalam pileg, dari 12 peserta partai politik nasional yang mendaftar, hanya 10 partai yang lolos *parliamentary threshold*.

Tak jauh beda dengan pileg, pilpres yang dilaksanakan pada 9 Juli juga berjalan aman, tertib dan damai.

Tentu saja, sekali lagi sebagaimana pileg, dengan beberapa catatan



yang bisa menjadi rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Pilpres kali ini diikuti oleh dua pasangan, yaitu pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla. Pilihan rakyat Indonesia pun menempatkan Joko Widodo - Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Pembaca budiman, ada hal menarik dari pemilihan umum kali ini. Tingkat partisipasi publik cukup meningkat. Tentu saja ini kabar yang menggembirakan, sebab lalu lintas demokrasi prosedural berjalan dengan meriah. Politik bukan lagi menjadi hal tabu. Secara tak langsung, pendidikan politik berjalan, meski masih

belum dilakukan secara sistemik. Tentu saja bagi KPU, ini merupakan tantangan tersendiri. KPU harus benar-benar menjadi wasit yang menunjukkan netralitasnya.

KPU juga harus memenuhi harapan publik yang begitu besar dengan melaksanakan setiap pemilihan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Syukur, amanah dan kepercayaan itu dilakukan dan dilaksanakan KPU dengan sebaik-baiknya, dengan penuh komitmen.

Pembaca budiman, Suara KPU kali ini berusaha merekam proses pileg dan pilpres 2014. Tentu tak ketinggalan, evaluasi dari semua mengapa proses itu sangat penting untuk disajikan. Evaluasi merupakan satu keniscayaan dalam setiap program dan kegiatan.

Evaluasi, selain untuk mengukur tingkat kesuksesan, juga menjadi sarana untuk perbaikan secara terus menerus. Sebab, tak ada gading yang tak retak.

Bagi KPU sendiri, perjuangan hari ini belumlah selesai. Jalan terjal lain masih terus menanti demokrasi. Tentu saja semua pihak berharap, demokrasi adalah jembatan untuk mengantar rakyat pada kesejahteraan. \*\*\*



## “Perjuangan Ini Belum Selesai”

**INDONESIA merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Secara umum, Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 berjalan dengan aman, tertib, lancar dan damai.**

### Pemilihan Legislatif

Pemilihan legislatif diikuti oleh 15 partai politik, yang terdiri dari 12 partai politik nasional dan tiga partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam. Partai politik nasional terdiri dari Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Hanura,

Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Sementara partai lokal di Aceh terdiri dari Partai Aceh (PA), Partai Nasional Aceh (PNA) dan Partai Damai Aceh (PDA).

Dari 12 partai nasional itu, dua partai politik tidak memenuhi *parliamentary threshold* (ambang batas parlemen). Kedua partai itu adalah PBB dan PKPI. Berdasarkan ketentuan Pasal 208 UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, partai

politik yang diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR adalah partai politik yang memenuhi perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah nasional.

Jumlah perolehan suara sah secara nasional diperoleh PBB adalah 1.825.750 (1,46 persen) suara, sementara jumlah suara nasional yang diperoleh PKPI adalah 1.143.094 suara (0,91 persen). Sementara 10 partai lainnya berhasil memenuhi ambang batas parlemen. Partai NasDem dengan 8.402.812 (6,72 persen) suara, PKB



dengan 11.298.957 suara (9,04 persen), PKS dengan 8.480.204 suara (6,79 persen), PDIP dengan jumlah 23.681.471 suara (18,95 persen), Partai Golkar dengan 18.432.312 suara (14,75 persen), Partai Gerindra dengan jumlah 14.760.371 suara (11,81 persen), Partai Demokrat dengan 12.728.913 suara (10,19 persen), PAN dengan 9.481.621 suara (7,59 persen), PPP dengan 8.157.488 suara (6,53 persen), dan Partai Hanura 6.579.498 suara (5,26 persen).

Total suara yang diperoleh semua partai politik ini berasal dari 77 daerah pemilihan. Total suara sah mencapai 124.972.491 suara.

Dengan jumlah suara masing-masing, PDIP meraih kursi terbanyak di DPR. PDIP meraih 109 kursi, Golkar 91 kursi, Gerindra 73 kursi, Demokrat 61 kursi,

PAN 47 kursi, PKS 40 kursi, PPP 39 kursi, Partai Nasdem 36 kursi dan Partai Hanura 16 kursi.

**Pemilihan Presiden**

Untuk pemilihan presiden, ada dua pasangan calon yang mendaftar dan ditetapkan oleh KPU RI. Pasangan itu adalah Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Prabowo-Hatta, dengan nomor urut satu, diusung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, PPP, dan PBB. Sementara Jokowi-JK diusung oleh PDIP, Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura, dan PKPI. Partai Demokrat sendiri mendukung pasangan Prabowo-Hatta, meskipun juga ada sementara elitnya mendukung Jokowi-JK.

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan calon presiden

dan wakil presiden adalah memiliki visi, misi, dan program.

Visi dan misi Prabowo-Hatta tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Visi Prabowo-Hatta adalah Negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, makmur dan bermartabat. Sementara misi Prabowo-Hatta mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman dan stabil, sejahtera, demokratis, dan berdaulat, serta berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia, serta konsisten melaksanakan Pancasila dan UUD 1945; Mewujudkan Indonesia yang maju, adil, makmur, berkeadilan, dan mandiri; Mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial, dengan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berbudi luhur, berkualitas tinggi seperti sehat, cerdas, kreatif, terampil serta menguasai ilmu pengetahuan

**“Tidak mudah untuk meyakinkan semua pihak apakah kami (penyelenggara pemilu) dapat menjalankan tugas ini,”**

**“Salah satu hal yang memotivasi adalah optimisme Anggota Komisi II DPR - RI bahwa kami adalah tim yang terbaik,”**

dan teknologi.

Penjabaran dari misi Prabowo-Hatta adalah mewujudkan sumberdaya manusia yang berakhlak mulia, berbudi luhur, berbudaya dan beradab; mewujudkan bangsa yang berkualitas, berdaya saing, kreatif, rasional, dan menguasai IPTEK, mewujudkan masyarakat berdemokrasi berlandaskan hukum, mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu; mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan merata dalam pembangunan; mewujudkan Indonesia berperan penting dalam perdamaian dunia serta konsisten menjalankan UUD 45 dan Pancasila; mewujudkan Indonesia yang hijau dan lestari.

Sementara visi pasangan Jokowi-JK adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong. Misi Jokowi-JK adalah mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan Negara hukum; mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; mewujudkan bangsa yang berdaya saing; mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas, pasangan Jokowi-JK juga merumuskan sembilan agenda aksi dalam pemerin-



tahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut Nawacita. Yaitu menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; Melakukan revolusi karakter bangsa; Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Setelah kedua pasangan menggelar kampanye, akhirnya tepat pada 9 Juli 2014, rakyat Indonesia memilih di antara keduanya. Dalam pilpres itu, total jumlah suara mencapai 134.953.967 suara. Dari total suara itu, jumlah suara sah mencapai 133.574.777 suara (98,98 persen) dan jumlah suara tidak sah mencapai 1.379.890 (1,02 persen).

Dari jumlah suara sah itu, pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 62.576.444 suara (46,85 %), sementara Jokowi-JK memperoleh 70.997.833 suara (53,15%). Dengan demikian, KPU kemudian menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Keputusan KPU tersebut menjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). MK lantas menolak permohonan pemohon secara keseluruhan. Dengan demikian, putusan MK memperkuat putusan KPU.

**Keterlibatan Lembaga Pemantau**



## “Tidak mudah menyelenggarakan pemilu, banyak sekali cobaan dan gangguan. Saya tahu karena saya menjadi salah satu pelaku pemilu,”

Setiap hasil survei, lanjut Husni, akan dipantau dan dinilai oleh media, baik secara positif ataupun negatif, dan akan dijadikan acuan oleh masyarakat. Ia mengharapkan setiap lembaga survei harus dapat mempublikasikan hasil surveinya dengan netral dan tidak memihak salah satu partai politik peserta Pemilu 2014.

Selain tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, Husni juga menghimbau lembaga-lembaga itu untuk tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu, tidak mengubah data lapangan maupun pemrosesan data, dan menggunakan metode penelitian ilmiah dalam proses survei yang dilakukan dengan menginformasikan metode apa yang digunakan dalam melakukan *sampling*, menyebutkan sumber dana, jumlah responden, tanggal, dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan hitung cepat secara lengkap.

### Evaluasi Pileg dan Pilpres

Dalam sambutan rapat evaluasi pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2014, Jumat (10/10), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil menyampaikan bahwa laporan evaluasi tahapan Pemilu merupakan hal penting yang dapat digunakan sebagai memori kolektif yang terlembagakan.

“Catatan evaluasi ini perlu kita jadikan memori kolektif yang terlembagakan, sehingga dalam penyelenggaraan Pemilu yang akan datang, penyelenggara Pemilu mendapatkan referensi yang cukup mengenai dinamika dan persoalan yang sebelumnya telah bersama-sama kita lalui,” ujar Husni.

Rapat evaluasi yang diprakarsai oleh KPU tersebut dihadiri semua mitra kerja KPU dalam penyelenggaraan

Pemilu, mulai Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2009-2014, para pimpinan dari Bawaslu RI, Dukcapil Kemendagri, Kemenpan RB, Badan Pertanahan, Ombudsman, BKN, Arsip Nasional, dan pejabat eselon I dan II Sekretariat Jenderal KPU RI untuk bersama-sama memberikan catatan yang dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemilu.

Dalam rapat yang berlangsung di Hotel Grand Aquila, Pasteur, Bandung tersebut, KPU melalui Ketua KPU mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang telah terjalin selama ini. Ia menyampaikan, tugas yang

Menurutnya, salah satu hal yang memotivasi penyelenggara pemilu adalah optimisme para Anggota Komisi II DPR RI.

“Salah satu hal yang memotivasi adalah optimisme Anggota Komisi II DPR RI bahwa kami adalah tim yang terbaik. Alhamdulillah semua tahapan telah kita selesaikan, banyak pelajaran yang kami dapat dari semua dinamika ini,” terang-nya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPR RI Periode 2009-2014,



diemban para penyelenggara Pemilu 2014 bukanlah tugas yang mudah jika tidak ada dukungan dari semua mitra tersebut.

“Tidak mudah untuk meyakinkan semua pihak apakah kami (penyelenggara pemilu) dapat menjalankan tugas ini. Dukungan semua mitra sangat kami rasakan, namun besar pula harapan yang masyarakat gantungkan kepada kami,” sebut Husni.

Agun Gunanjar Sudarsa memberikan saran kepada KPU untuk membenahi daftar pemilih, yang dalam penyelenggaraan pemilu menjadi persoalan tersendiri.

“Kepada penyelenggara pemilu, saya harap dapat meningkatkan kinerja segala aspek, terutama dalam membangun sistem yang komprehensif untuk menyusun daftar pemilih secara faktual, karena dalam pelaksanaan

### dan Lembaga Survei

Pileg dan pilpres 2014 ini juga melibatkan lembaga pemantau non-pemerintah. Ada 19 lembaga pemantau pemilu yang mendaftar dan diresmikan oleh KPU. Lembaga itu adalah Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Komite Independen Pemantau Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Garda Santri Nusantara (Garsantara), Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat (Migrant Care), Pendiri Yayasan Kemanusiaan Erihatu Samasuru Lesuri Tapirone (ESLT), Perkumpulan Reclassering Indonesia, Lembaga Study International Ora Et Labora, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan

Sosial (LP3ES), Partnership for Governance Reform (Kemitraan), LSM Pijar Keadilan, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Perkumpulan Badan Eksekutif LitBang dan Advokasi Sosial (belas), Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI), Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (LP3-NK-RI), Cyrus Nusantara, Institute for Democracy, Politics dan Human Rights (Indepth), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia.

Selain 19 lembaga pemantau, ada juga 56 lembaga survei dan *quickcount* (hitung cepat). Di antara lembaga itu adalah Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Lembaga Survei Indonesia (LSI),

Media Survei Nasional, Indikator Politik Indonesia, Cyrus Nusantara, Saiful Mujani Research and Consultants (SMRC), Pol-Tracking Indonesia, Cyrus Surveyors Group, IndoBarometer, Polmark Indonesia, Charta Politika, Kompas, Soegeng Sarjadi Sindyate dan lain-lain.

Menurut Ketua KPU, Husni Kamil Manik, launching tersebut merupakan apresiasi KPU atas peran aktif lembaga pemantau serta lembaga survei dan hitung cepat dalam mensukseskan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014. Bagi KPU, lembaga-lembaga ini adalah mitra-mitra strategis KPU dalam bahu-membahu mensukseskan Pemilu 2014.

“Kita perlu membuat catatan atas hal-hal yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu yang telah kita lalui, sehingga tidak terjadi permasalahan serupa setelah kita, selaku penyelenggara,”

pemilu data pemilih merupakan hal yang krusial,” pesan Agun. Atas penyelenggaraan pemilu yang berjalan dengan baik, Agun menyampaikan rasa bangga dan hormat kepada seluruh penyelenggarapemilu.

“Saya memberi apresiasi besar kepada para penyelenggara pemilu. Kami bangga, hormat, kepada KPU dan Bawaslu atas suksesnya Pemilu tahun 2014 ini. Semoga ke depan penyelenggaraan pemilu dapat meningkat secara kualitas,” terangnya.

Sebagai upaya meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan Rapat Pimpinan (Rapim) tentang evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2014, Senin (13/10). Rapat yang digelar di Kantor KPU RI, Jl. Imam Bonjol, Jakarta tersebut diikuti seluruh Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU dari 33 provinsi.

Sebagaimana dijelaskan Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik, penyusunan laporan itu bertujuan untuk membuat catatan terkait proses penyelenggaraan pemilu yang telah dilakukan.

“Kita perlu membuat catatan atas hal-hal yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu yang telah kita lalui, sehingga tidak terjadi permasalahan serupa setelah kita, selaku penyelenggara, melaksanakan tahapan-tahapan pemilu,” jelasnya. Ia berharap, hal tersebut dapat memotivasi seluruh aparat KPU untuk menghasilkan laporan evaluasi yang baik dan komprehensif.

“Saya harap ini memotivasi kita bersama untuk menghasilkan laporan



evaluasi yang baik, komprehensif, menyeluruh dari hulu hingga hilir penyelenggaraan pemilu,” kata Husni.

Sementara itu Komisioner KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, meminta semua jajaran KPU untuk memperhatikan mekanisme pelaporan, terkait fokus evaluasi apa saja yang perlu diberi penekanan tersendiri.

“Penting kita cermati mekanisme pelaporan, poin apa saja yang akan kita jadikan evaluasi, mulai dari sistem pemilu, penyelenggaraan pemilu, aktivitas proses pemilu, serta tingkat integritas hasil pemilu yang dapat diterima secara baik oleh masyarakat,” pesan Ferry.

Senada dengan Ketua KPU RI, Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay menjelaskan, tujuan penyusunan laporan evaluasi adalah untuk memberikan jalan keluar yang solutif terhadap persoalan yang timbul pada penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

“Tujuannya untuk memberikan jalan keluar yang solutif terhadap persoalan-persoalan dalam penyelenggaraan pemilu yang akan datang,” tutur Hadar.

Menurutnya, KPU dan jajarannya harus merangkul lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun pemerhati pemilu, agar mendapat eferensi lain yang mungkin terlewatkan oleh penyelenggara pemilu.

“Kita perlu merangkul pemangku kepentingan lain seperti NGO (*Non-Government Organization*) dan lembaga-lembaga penggiat pemilu, karena mereka dapat memberikan perspektif yang mungkin terlewat oleh kacamata kita sebagai penyelenggara pemilu,” sambung Hadar.

Selain meminta pendapat pihak lain, Hadar meminta jajaran KPU untuk melakukan evaluasi ke dalam. “Kita bisa juga melakukan survey kepada para pelaksana di lapangan, sehingga kita mendapatkan gambaran dari para

**“Tujuannya untuk memberikan jalan keluar yang solutif terhadap persoalan-persoalan dalam penyelenggaraan pemilu yang akan datang,”**

**“Saat Pak Husni (Ketua KPU RI) meminta bertemu, senang hati saya menerima. Memang saya ingin bertemu langsung, dan inilah saat yang tepat,”**

aparat tersebut mengenai aturan dan kinerja kita selama menyelenggarakan pemilu,” pungkasnya.

Dalam rapat evaluasi pelaksanaan Pemilu 2014, Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Dede Mariana, M.Si., memberikan perspektifnya mengenai *risk management* Sumber Daya Manusia pada penyelenggaraan pemilu, Sabtu (11/10).

Ia menjelaskan, KPU perlu menakar bidang mana saja yang memiliki beban besar terkait penyelenggaraan pemilu.

“Menurut saya, KPU perlu membuat skala beban kerja pada masing-masing bidang penyelenggaraan pemilu. Kemudian menempatkan orang-orang yang tepat dan kapabel sesuai bidangnya,” tandas Dede.

Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah preventif dalam menyusun evaluasi tahap perencanaan/*ex-ante*. Ia menambahkan, KPU perlu merekrut relawan yang benar-benar mampu menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

“Bapak ibu sebaiknya merancang semacam studi banding, dan merekrut relawan yang benar-benar relawan. Dalam arti para relawan pemilu yang KPU rekrut tersebut merupakan relawan yang mampu dan yang memang *concern* mengenai penyelenggaraan pemilu,” pesannya kepada para peserta rapat evaluasi tahapan pemilu hari kedua di Hotel Grand Aquila, Kota Kembang.

Lebih lanjut, Dede menjelaskan, KPU perlu membangun instrumen yang tepat guna mengawal tahapan-tahapan pemilu yang rawan terhadap pelanggaran.

“Bangun aturan yang mengikat terkait tahapan-tahapan pemilu yang rawan terhadap pelanggaran. Mengenai aturan dan sanksi yang mengikat

tentang kampanye terselubung, pemalsuan syarat calon terpilih, sumber dana kampanye dan persoalan pemekaran daerah otonom baru yang mengundang perdebatan daerah pemilihan,” terangnya. Staf ahli Gubernur Jawa Barat ini secara khusus memberi masukan kepada KPU untuk menyusun laporan evaluasi dengan metode *Context-Input-Process-Product (CIPP Evaluation Model)*.

Menurutnya, metode tersebut akan memberikan hasil yang komprehensif,



meskipun dalam penyusunannya cenderung kompleks. “KPU tidak perlu mengerjakan itu sendiri, serahkan saja kepada perguruan tinggi yang kapabel dalam penyusunan laporan. Menurut saya hal itu akan memberi kemudahan tersendiri bagi KPU,” tuturnya.

Sementara itu pada 14 Oktober 2014, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), secara resmi membuka rapat pimpinan mengenai evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014, di Istana Negara. Presiden SBY mengucapkan syukur atas terselenggaranya pertemuan untuk menyatukan semangat dalam

rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu.

“*Alhamdulillah* kita dapat bersilaturahmi bersama untuk membulatkan semangat dan tekad untuk menyelenggarakan pemilu dengan sebaik-baiknya serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu pada waktu yang akan datang,” pesan Presiden SBY.

Pertemuan dengan penyelenggara pemilu sebenarnya telah lama diharapkan oleh Presiden SBY. Namun ia menunggu waktu yang tepat, sehingga penyelenggaraan pemilu tetap berjalan independen, mandiri dan bebas dari pengaruh manapun.

“Saat Pak Husni (Ketua KPU RI) meminta bertemu, senang hati saya menerima. Memang saya ingin bertemu langsung, dan inilah saat yang tepat, karena dalam beberapa saat lagi masa jabatan saya telah usai. Hal ini tidak saya lakukan pada waktu-waktu sebelumnya karena tidak menginginkan opini publik yang beranggapan bahwa pemerintah mencoba mendekatkan diri kepada penyelenggara pemilu,” tuturnya.

Ia menyatakan bahwa tidak mudah untuk menyelenggarakan pemilu. Untuk itu, ia mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas



penyelenggaraan pemilu yang berjalan adil dan bebas dari kepentingan manapun.

“Tidak mudah menyelenggarakan pemilu, banyak sekali cobaan dan gangguan. Saya tahu karena saya menjadi salah satu pelaku pemilu. Untuk itu, saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada penyelenggara pemilu yang berhasil menggelar pemilu secara lancar, fair dan free of interest election,” lanjut Presiden SBY.

Secara khusus ia meminta jajaran KPU di tingkat provinsi, yang hadir dalam acara tersebut, untuk meningkatkan kualitas Pemilu dengan merancang sistem kepemiluan yang baik, mapan, lebih murah, mudah, dan cepat.

“Kita akan mencapai konsolidasi nasional mengenai penyelenggaraan pemilu. Jika pada Pemilu 2019 yang akan datang berjalan adil dan aman. Untuk itu saya mendorong jajaran KPU dan

Bawaslu yang hadir untuk membuat penyelenggaraan Pemilu yang lebih mapan, mudah, murah, dan cepat. *Better, cheaper, easier, faster,*” sambungnya.

Peresmian rapim evaluasi evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemilu yang dihadiri pula oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto dan para petinggi TNI/Polri tersebut ditutup oleh Presiden SBY dengan memukul gong sebanyak lima kali sebagai simbolisasi jumlah sila dalam Pancasila.

#### Perjuangan Belum Selesai

Anggota DPR dan DPD periode 2014-2019 secara resmi sudah diambil sumpah pada 1 Oktober lalu di Gedung DPR/MPR Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Acara pelantikan pun langsung diikuti dengan sidang paripurna untuk menentukan pimpinan DPR.

Secara resmi, pimpinan DPR sudah

terpilih, yang terdiri dari Setya Novanto sebagai Ketua, dengan Wakil Ketua Fahri Hamzah, Taufik Kurniawan, Fadli Zon dan Agus Hermanto. Sementara pimpinan DPD terdiri dari Irman Gusman sebagai Ketua, dengan Wakil Ketua Faraouk Muhammad dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Untuk pimpinan MPR, terpilih Zulkifli Hasan sebagai Ketua, dengan Wakil Ketua Mahyudin, Oesman Sapta, EE Mangindaan dan Hidayat Nur Wahid.

Sedangkan pengambilan sumpah Jokowi sebagai Presiden dan Jusuf Kalla sebagai wakil Presiden dilakukan pada 20 Oktober lalu. Secara resmi, proses demokrasi prosedural di tahun politik 2014 tuntas sudah. Namun demikian, demokrasi substansial masih harus terus diperjuangkan dari waktu ke waktu.

Karena itu, bagi KPU, berakhirnya proses demokrasi ini bukan berarti boleh beristirahat. Bagaimanapun, perjuangan masih panjang; mengawal demokrasi yang tak kenal henti. **[Yan/Wid/Mel/Sof]**

**“Kita akan mencapai konsolidasi nasional mengenai penyelenggaraan pemilu, jika pada Pemilu 2019 yang akan datang berjalan adil dan aman. Untuk itu saya mendorong jajaran KPU dan Bawaslu yang hadir untuk membuat penyelenggaraan pemilu yang lebih mapan, mudah, murah, dan cepat. *Better, cheaper, easier, faster,*”**

HUSNI KAMIL MANIK:

## Transparansi Menonjol dalam Pemilu Kali Ini

Sejak awal, kami ingin publik menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap penyelenggaraan Pemilu. Karena itu, kami memberi akses informasi kepemiluan yang seluas-luasnya kepada publik.

HUSNI Kamil Manik, sebagai Ketua KPU, mengakui ada banyak hambatan dalam Pemilu dan Pilpres 2014. Namun semua hambatan itu diurai satu per satu, dan akhirnya bisa diatasi. Dengan bangga, Husni Kamil mengatakan bahwa hal paling menonjol dari pemilihan kali ini adalah aspek transparansi dan akuntabilitas.

Inilah wawancara lengkap dengan Husni Kamil Manik.

#### Bagaimana Anda menggambarkan tentang Pemilu 2014 kemarin?

Tahun 2014 ada dua jenis Pemilu yang kita laksanakan. Pertama, Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD yang pemungutan suaranya digelar 9 April 2014. Kedua, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang pemungutan suaranya digelar 9 Juli 2014. Pemilu 2014 merupakan Pemilu ke-4 yang dilaksanakan setelah reformasi dan Pemilu ke-11 setelah Indonesia merdeka. Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, kita telah melaksanakannya secara langsung untuk ketiga kalinya.

Penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 sangat kompleks. Ada 187.827.987 pemilih yang harus difasilitasi untuk dapat menggunakan hak pilihnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ada sekitar 5 juta penyelenggara yang tersebar di seluruh Indonesia dan di luar negeri yang harus diorganisir untuk menyelenggarakan Pemilu di setiap tingkatan. Ada 15 partai politik peserta Pemilu (12 partai politik nasional dan 3 partai lokal Aceh) dengan jumlah caleg DPR RI sebanyak 6.608 dan 945 caleg DPD serta ratusan ribu caleg DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Alhamdulillah dengan regulasi yang semakin baik, penyelenggara yang



makin profesional, peserta dan pemilih yang makin sadar akan hak-hak politiknya, kita dapat menyelenggarakan Pemilu DPR, DPD dan DPRD yang lebih kredibel. Kita juga berhasil mendorong peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilu legislatif mencapai 75,11 persen. Meningkat dari Pemilu sebelumnya, hanya 71 persen.

Kepercayaan publik terhadap proses dan hasil Pemilu baik Pemilu DPR, DPD dan DPRD maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden cukup tinggi. Hasil survei

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) sebanyak 67,49 persen percaya dengan hasil perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Pelaksanaan semua tahapan Pemilu berjalan aman dan lancar. Memang dalam setiap tahapan selalu ada dinamika, ada riak-riak yang muncul tetapi dengan tingginya kesadaran politik dari peserta dan masyarakat, dinamika itu dapat diselesaikan melalui prosedur yang sudah diatur dalam kerangka hukum Pemilu.

### Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kemarin?

Dalam setiap kegiatan, hambatan dan tantangan pasti ada. Berkat kerja sama dan komunikasi yang baik dengan semua *stakeholders*, berbagai hambatan dan tantangan itu dapat kita atasi. Salah satu contoh mekanisme pencairan dana Pemilu.

Awalnya untuk Pemilu DPR, DPD dan DPRD, KPU menggunakan format daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) 076 yang sangat birokratis. Akibatnya sejumlah tahapan Pemilu terganggu seperti tahapan pemutakhiran data pemilih.

Panitia pemutakhiran data pemilih (Pantarli) yang telah merampungkan kegiatan verifikasi faktual data pemilih ke lapangan di sejumlah tempat enggan menyerahkan hasil kerjanya ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) karena honorinya terlambat dibayar. Setelah kita lakukan komunikasi dengan pemerintah dan DPR, akhirnya proses pencairan dapat lebih mudah dilakukan.

Selain aspek pembiayaan, petugas juga mengalami hambatan dalam pemutakhiran data pemilih. Mobilitas penduduk di dalam negeri dan di luar negeri yang sangat tinggi menyulitkan petugas melakukan verifikasi faktual di lapangan.

Ada sejumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih di dua daerah. Untuk kepastiannya kita minta yang bersangkutan membuat surat pernyataan, di mana yang bersangkutan akan menggunakan hak pilih. Hal ini dilakukan untuk menghindari data ganda.

Kami juga awalnya kesulitan mengelola data pemilih bagi warga yang tidak memiliki identitas kependudukan atau mereka memiliki identitas kependudukan tetapi terdapat data invalid dalam sejumlah elemen datanya. Untuk kasus warga yang tidak memiliki identitas di akomodir dalam daftar pemilih khusus (DPK) dan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTB). Untuk warga yang elemen datanya tidak lengkap atau invalid, KPU bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Dagri) untuk mengecek ulang dan memastikan akurasi elemen datanya.

Dalam pendistribusian logistik untuk

kebutuhan pemungutan suara, faktor alam juga menjadi hambatan di sejumlah daerah. Pemungutan suara di 36 distrik di Kabupaten Yahukimo terpaksa ditunda karena pesawat pengangkut logistik tidak dapat terbang ke daerah itu. Cuaca ekstrim menghambat aktivitas penerbangan. Pemilu yang sedianya digelar serentak secara nasional pada 9 April 2014, baru dapat dilaksanakan di 31 distrik pada 12 April 2014 dan di lima distrik pada tanggal 15 April 2014.

### Dari segi penyelenggaraan, apa yang membedakan dengan Pemilu-pemilu sebelumnya?

Sangat banyak sekali. Tetapi yang paling menonjol adalah aspek transparansi dan akuntabilitas. Sejak awal, kami



ingin publik menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap penyelenggaraan Pemilu. Karena itu, kami memberi akses informasi ke pemilu yang seluas-luasnya kepada publik.

Untuk mendukung komitmen transparansi dan akuntabilitas itu, kami mengembangkan sejumlah sistem informasi seperti sistem informasi partai politik (Sipol), sistem informasi data pemilih (sidalih), sistem informasi daerah pemilihan (sidapil), sistem informasi pencalonan (Silon), sistem informasi logistik (silog) dan sistem informasi penghitungan suara (situng).

### Bagaimana dengan angka golput pada Pemilu 2014 dibanding sebelumnya?

Untuk Pemilu DPR, DPD dan DPRD terjadi peningkatan partisipasi pemilih. Dari sebelumnya 70,9 persen menjadi 75,11 persen. Peningkatan partisipasi pemilih ini otomatis menurunkan angka

golput. Tadinya golput berada di angka 29,1 persen, menurun menjadi 24,89 persen.

Sementara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terjadi sedikit penurunan. Pada Pemilu 2009 partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mencapai 71,70 persen, sementara partisipasi pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 berada di angka 70,9 persen.

### Ada yang menarik dari Pemilu 2014?

Sangat banyak yang menarik karena memang banyak sekali yang berubah dengan Pemilu 2014. Salah satunya maraknya penggunaan media sosial seperti *Twitter* dan *Facebook* sebagai ruang untuk kampanye di kalangan peserta Pemilu. Kami sebagai penyelenggara juga merespons perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan media untuk berkomunikasi. Karena itu, kami menyediakan akun *Twitter* dan *Facebook* resmi sebagai sarana sosialisasi, komunikasi dan berdialog dengan publik.

Yang menarik lagi pemeriksaan daftar pemilih tetap (DPT). Masyarakat tidak perlu datang ke PPS untuk mengecek apakah dirinya sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih. KPU menyediakan daftar pemilih secara online sejak daftar pemilih masih berstatus daftar pemilih sementara (DPS). Fasilitas ini kami sediakan dalam rangka memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan sekaligus memberikan kemudahan akses kepada pemilih. Memang belum sepenuhnya sempurna, tetapi ini terobosan yang perlu kita kembangkan terus ke depan. Kami juga mengelola debat calon Presiden dan Wakil Presiden yang lebih menarik minat masyarakat. Debat menjadi tontonan acara televisi yang ditunggu-tunggu.

Di luar itu, kebijakan KPU menyediakan hasil penghitungan suara melalui aplikasi sistem informasi penghitungan suara mampu mendorong partisipasi yang luar biasa besar dari masyarakat untuk mengawal proses rekapitulasi suara secara berjenjang.

Setidaknya ada enam website *crowdsourcing* yang berpartisipasi dalam penghitungan suara seperti Kawal Pemilu, Kawal Suara, C1 Aneh, Data Pilpres, Real Count, dan Pilpres 2014. Misalnya situs C1 Aneh itu khusus menampilkan C1 yang penghitungan

suaranya tidak sinkron. Itu menjadi bahan masukan yang sangat berharga bagi kami untuk melakukan pengecekan dan koreksi jika memang ada kesalahan dalam penghitungan suara di tingkat TPS. Dengan demikian, rekapitulasi hasil Pemilu yang ditetapkan KPU secara nasional benar-benar valid.

### Perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2014?

Kalau bicara perbaikan tentu sangat banyak. Hampir setiap tahapan kami lakukan perbaikan. Tahap pendaftaran dan verifikasi partai politik, kami memisahkan antara tim yang menerima berkas pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu dengan tim yang memeriksa berkas.

Cara ini dilakukan untuk mendorong terbangunnya *cek and balance* di antara tim penerima dan tim pemeriksa berkas. Kami memperkenalkan sistem informasi partai politik (Sipol) untuk memudahkan peserta Pemilu dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan untuk proses verifikasi. Untuk pelaksanaan verifikasi kami membagi menjadi dua tahap yakni verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Pemisahan ini bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi kerja.

Pada tahap penataan dapil dan alokasi kursi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Meski kewenangan penataan dapil itu ada di tangan KPU Pusat, tugas itu kami delegasikan kepada KPU sesuai tingkatannya karena merekalah yang lebih memahami aspek geografis, demografis, dan sosiokultural di daerah.

Kami juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dapil. Kami membuka ruang komplain bagi warga setelah penetapan dapil. Hanya ada beberapa dapil yang dikomplain warga setelah ditetapkan dan setelah dilakukan kajian berdasarkan tujuh prinsip penataan dapil akhirnya aspirasi masyarakat tersebut diakomodir.

Pada tahap pencalonan, kami menerapkan asas transparansi. Setelah partai politik memasukkan berkas pencalonan, dilakukan pengecekan secara bersama-sama dengan petugas penghubung, dibuatkan berita acara dan ditandatangani secara bersama. Kemudian hasil pengecekan berkas itu dipublikasikan kepada publik melalui web site KPU.

Masyarakat dan caleg di setiap partai dapat melihat dokumen apa yang sudah lengkap dan memenuhi syarat dan dokumen apa yang masih kurang dan berstatus belum memenuhi syarat. Kebijakan transparansi ini sempat diprotes sejumlah partai karena nomor urut bakal calon anggota DPR langsung terpublikasi. Tetapi secara umum masyarakat dan caleg merespons positif kebijakan transparansi KPU tersebut.

Kami juga mempublikasikan biodata caleg sejak mereka berstatus sebagai daftar calon sementara (DCS) hingga berubah statusnya menjadi daftar calon tetap (DCT). Dengan begitu, publik sejak awal dapat mengetahui latar belakang setiap caleg di dapilnya.



Informasi awal ini akan mendorong publik untuk mencari informasi yang lebih lengkap sebelum menentukan pilihan pada pemungutan suara. KPU menyediakan layanan secara online yang dapat digunakan masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap setiap calon yang diajukan parpol.

Pada tahap pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, kami menggunakan aplikasi sistem informasi data pemilih (sidalih). Sistem ini berfungsi sebagai alat konsolidasi data, pemeliharaan dan pemutakhiran, sosialisasi dan publikasi. Lewat Sidalih, informasi data pemilih dapat disampaikan secara terbuka, mudah diakses dan cepat kepada semua lapisan masyarakat melalui portal [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id).

KPU merilis daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT) secara online melalui website KPU. Masyarakat dapat mengecek DPS dan DPT secara online untuk memastikan dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum, termasuk melakukan koreksi jika terdapat kesalahan penulisan identitas seperti nama, nomor induk kependudukan (NIK), jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir.

Pada tahap pemungutan dan penghitungan suara, KPU membuka akses informasi hasil penghitungan suara yang seluas-luasnya kepada mas-

asyarakat. KPU melakukan scanning (pemindaian) formulir C1 dan lampirannya (sertifikat hasil penghitungan suara dan rincian perolehan suara di TPS) dan meng-*upload*-nya ke website KPU. Melalui fasilitas Situng, publik dapat mengetahui perkembangan hasil rekapitulasi di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Indonesia.

Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, KPU berhasil menengguhkan hasil scanning formulir C1 dan lampirannya 81,54 persen. Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, KPU berhasil menengguhkan hasil scanning C1 dan lampirannya mencapai 99 persen. Kebijakan tersebut menempatkan Indonesia sebagai Negara pertama di dunia yang mempublikasikan hasil Pemilu secara terbuka dan transparan kepada publik dengan basis TPS. [Yan]





ASEP WARLAN YUSUF:

# KPU Berhasil Selenggarakan Pemilu dengan Sukses

Proses pemilihan umum terutama penyelenggaraan Pilpres, telah berlangsung secara jujur, adil, damai, aman, demokratis, dan bermartabat.

DI TENGAH ruang publik yang semakin terbuka, meminjam istilah pemikir Jerman Jurgen Habermas, maka setiap warga negara bebas menyampaikan pandangan terkait dengan kebijakan publik atau hal-hal lain yang terakut dengan kepentingan umum. Pun soal pemilihan umum, banyak catatan, pandangan,

penilaian soal penyelenggara maupun proses penyelenggaraan pemilu. Tentu saja, pandangan yang obyektif, dan jauh dari sinisme berlebihan, sangat diperlukan untuk semakin meramaikan ruang publik sehingga kepentingan umum benar-benar terpenuhi. Terkait dengan hal itu, *Suara KPU*, berhasil mewawanca-

rai Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH, MH.

Prof. Asep merupakan Kepala Program Doktor Ilmu Hukum dan Kepala Program Magister Ilmu Hukum Universitas Parahyangan Bandung. Asep sangat otoritatif berbicara soal pemilu, lebih-lebih juga sering tampil di publik, bukan hanya

sebagai pakar ilmu hukum, melainkan juga sebagai pengamat politik yang pandangan-pandangannya sangat empiris dan terbukti, dengan ukuran idealitas tetap merujuk pada Konstitusi.

*Inilah wawancara lengkap dengan Kang Asep, begitu ia disapa.*

## Bagaimana pandangan Anda tentang Pemilu 2014 kemarin secara umum?

Sebelum saya menjawab pandangan saya mengenai pelaksanaan pemilu legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2014, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat dan penghargaan yang tinggi kepada penyelenggara pemilu baik KPU RI dan KPU Daerah serta kepada Bawaslu dan Bawaslu Daerah yang telah berhasil menyelenggarakan pileg dan pilpres yang berlangsung sukses, aman, dan lancar.

Mengawali dengan pernyataan apresiasi tersebut di atas, tentunya berkaitan dengan pandangan saya berikutnya terhadap penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2014.

Ukuran keberhasilan itu paling tidak dapat dilihat dari, pertama, proses pemilihan umum, terutama penyelenggaraan Pilpres telah berlangsung secara jujur, adil, damai, aman, demokratis, dan bermartabat. Hal ini terbukti adanya pengakuan legalitas secara yuridis formal melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan PTUN Jakarta, dan juga oleh DKPP yang pada intinya hasil pemilu adalah sah, dan dari sisi legitimasi telah pula diterima secara legowo, sportif, dan bermartabat oleh semua pihak.

Kedua, melahirkan pemilih yang berkualitas, cerdas, rasional, dan partisipatif. Ketiga, bersama-sama pihak keamanan telah mampu mencegah terjadinya konflik horizontal maupun vertikal yang cenderung anarkistik

yang menimbulkan kondisi Negara dalam keadaan darurat. Bahwa di sana sini ada gejolak, riak dan aksi protes masih dianggap wajar.

Keempat, penyelesaian berbagai sengketa telah diselesaikan dengan baik melalui jalur hukum atau peradilan, dan dewan kehormatan. Kelima, meskipun telah dijatuhkan sanksi etik oleh DKPP terhadap beberapa komisioner, baik ditingkat KPU RI maupun KPU Daerah, namun secara umum telah berhasil menghadirkan KPU maupun KPUD, Bawaslu maupun Panwaslu, Polri, yang jujur, amanah, independen, dan profesional. Hal ini terbukti dari hasil sidang DKPP maupun badan peradilan yang hanya sedikit sekali penyelenggara yang dihukum.

Keenam, dukungan dan antusiasme masyarakat dalam penyelenggaraan-pemilu relatif baik, hal ini terbukti dari partisipasi penggunaan hak pilih yang di atas 65 persen. Terakhir, hasil pemilu yang kini telah memperoleh legalitas dan legitimasi dalam penentuan pemenang pileg maupun pilpres.

## Dari hasil penyelenggaraan pemilu kemarin, menurut Anda apa saja yang mesti dibenahi atau yang menjadi catatan penting bagi KPU?

Ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan untuk KPU khususnya, dan Pemerintah serta Partai Politik pada umumnya.

Pertama, perlu dipikirkan pembiayaan pemilu yang lebih rasional dan efisien tanpa mengabaikan dan menanggalkan nilai-nilai luhur demokrasi dan penguatan sistem pemilunya. Kedua, perlu dibuat regulasi yang sejelas dan sepasti mungkin apa yang dimaksud dengan perbuatan politik uang (*money politic*) dan biaya politik (*political cost*) yang dikeluarkan oleh peserta pemilu.

Ketiga, perlu terus dilakukan upaya pendidikan politik (*political education*), pendidikan kewargaan (*civil education*), dan pendidikan pemilih (*voter education*) agar ke depan pemilihan umum diselenggarakan dengan keterlibatan pemilih yang aktif, partisipatif, dan rasional.

Keempat, perlu dilakukan upaya yang sangat serius dan berkelanjutan dari partai politik. Seperti setiap parpol wajib melakukan edukasi politik secara sistematis, terprogram, dan berkesinambungan. Setiap parpol harus membangun sistem rekrutmen politik yang lebih transparan, partisipatif, selektif, kompetitif, dan akuntabel. Parpol harus melakukan penyiapan secara serius terhadap kader-kadernya sebagai calon-calon pemimpin bangsa yang handal dan terpercaya di masa depan antara lain memiliki ciri tampilan fisik keren, akhlaq mulia, otak encer, hati lembut, perasaan peka, motivasi tinggi, peduli sosial.

Parpol juga harus membangun etika politik yang santun dan bermartabat yang terinternalisasi pada para anggotanya. Parpol harus menyusun dengan baik visi, misi, platform, dan program kerja yang senantiasa ditawarkan kepada publik. Parpol juga harus mengagregasi dan memperjuangkan secara sungguh-sungguh tuntutan akan kebutuhan rakyat yang riil dan sedapat mungkin mewujudkannya. Parpol juga harus menjalin komunikasi politik yang sehat antar parpol sehingga terjadi koalisi ideologis secara permanen. Parpol juga harus memisahkan antara kepengurusan struktural parpol dengan jabatan publik atau pemerintahan.

Kembali ke catatan untuk KPU. Lagi-lagi soal daftar pemilih untuk benar-benar dibangun sistemnya yang akurat, lengkap, dan absah. Guna menghindari terjadinya politik uang, maka diperlukan pembatasan dan pengaturan yang ketat dana sumbangan kampanye,

**“Perlu dipikirkan pembiayaan pemilu yang lebih rasional dan efisien tanpa mengabaikan dan menanggalkan nilai-nilai luhur demokrasi dan penguatan sistem pemilunya,”**

disertai dengan pengenaan sanksi yang tegas dan keras, ketika ada pelanggaran dalam penggunaan biaya dalam pemilu.

Dalam rangka mengurangi biaya untuk honorarium dan terjadinya kesalahan teknis, apakah saatnya dalam pelaksanaan teknis pemungutan suara melibatkan perangkat kelurahan atau kecamatan. Sebaiknya dana pemilu, pilpres, dan pilkada juga dari APBN sepenuhnya. APBD diperlukan hanya untuk pendidikan kewargaan dan sosialisasi saja.

Untuk menghindari terjadinya praktek curang dalam bentuk dan cara apapun, maka kewenangan Bawaslu atau Panwaslu diperkuat. Sementara untuk menjaga netralitas birokrasi atau PNS, TNI dan Polri maka perlu dibuat pengaturan khusus yang lebih rinci, dan pengaturan sanksi yang ketat. Perlu juga adanya lembaga audit yang kuat dan independen untuk memeriksa keseluruhan dana pemilu (bukan sebatas dana kampanye saja) dari masing-masing peserta



pemilu.

Untuk Pilpres atau Pilkada (apabila DPR RI setuju dengan Pilkada langsung), sebaiknya dilakukan satu putaran saja.

**Menurut Anda, cukup baik kah upaya-upaya yang telah dilakukan KPU untuk meredam potensi konflik horizontal dalam penyelenggaraan Pemilu kemarin?**

Memang salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan Pemilu adalah berjalan dengan aman, damai dan tanpa konflik yang berarti. Kegagalan dari suatu penyelenggaraan pemilu adalah apabila terjadi *chaos* dan konflik yang hebat dan merata yang mengakibatkan negara dalam keadaan darurat.

**“Untuk Pilpres atau Pilkada (apabila DPR RI setuju dengan Pilkada langsung), sebaiknya dilakukan satu putaran saja.”**

Namun dengan kesadaran tinggi dari masyarakat, peserta pemilu, ketanggap segera dari Polri, serta kinerja dan yang baik dan profesional dari penyelenggara pemilu, *alhamdulillah wa syukurillah* Pemilu 2014 berjalan aman dan damai. Hal ini tentunya prestasi dan reputasi KPU dan segenap jajarannya yang mampu mencegah terjadinya konflik horizontal patut diapresiasi.

**Dari segi penyelenggaraan, menurut Anda apa yang membedakan Pemilu 2014 dengan Pemilu-pemilu sebelumnya?**

Tentunya untuk masing-masing penyelenggara pemilu dari satu periode ke periode berikutnya memiliki keunggulan dan sekaligus kelemahan. Namun yang terpenting dari semua periode penyelenggara pemilu adalah telah berhasil terpilihnya anggota legislatif dan presiden yang sah dan *legitimate*, terlepas dari kualitas orang yang terpilihnya.

Satu hal yang penting juga adalah penyelenggara periode sekarang ini mudah-mudahan tidak ada yang terlibat dalam perbuatan KKN dalam berbagai bentuk, cara, modus, dan substansinya.

**Apakah ada hal yang menarik dari Pemilu 2014 menurut Anda?**

Dari setiap pemilu bagi saya tetap menarik untuk dijadikan bahan pengkajian bagi kalangan dunia akademik, khususnya dalam pengembangan materi hukum tata negara dan ilmu politik. Harapan saya dari pemilu ke pemilu harus terjadi perbaikan, baik dari sistemnya maupun kualitas sumber daya manusianya.

Demikian pula dengan pemilu 2014 mengandung banyak pelajaran dan mengundang banyak inspirasi kajian. Penyelenggaraan pemilu tahun 2014 memberikan kesan bahwa dengan pemilihan umum yang jujur, adil, damai, dan bermartabat telah melahirkan semangat masyarakat untuk hidup dalam alam demokrasi yang modern dengan cita rasa asli Indonesia yakni mengedepankan prinsip kekeluargaan, musyawarah, amanah, dan berkeadaban.

**Bagaimana proyeksi Anda atas tantangan-tantangan yang akan dihadapi KPU untuk penyelenggaraan Pemilu mendatang, mengingat tahun 2019 Pileg dan Pilpres digelar secara serentak? Apa saja yang perlu disiapkan KPU?**

Untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2019 banyak hal yang perlu segera dibenahi dan disepakati antara *stakeholders* kepemiluan, antara lain, pertama, perlunya perubahan antara lain terhadap UU Pilpres, UU Pemilu, UU Kepartaian, dan UU MD3 yang harus jadi satu kesatuan sistem dalam satu paket yakni UU bidang demokrasi atau politik.

Mengapa perlu menjadi satu kesatuan sistem karena di antara satu UU dengan UU lainnya tersebut sangat berkaitan erat, misalnya apabila parpol tidak melakukan kaderisasi dan rekrutmen keanggotaan parpol, melakukan politik uang, dan tidak melakukan kewajiban dan fungsi parpol, maka harus dikenakan sanksi untuk tidak ikut pemilu.

Demikian pula dengan sistem kepemiluan juga harus ada perbaikan baik dari segi proses maupun substansinya, misalnya terkait *e-voting*, pemilu serentak, pembatasan dana pemilu, dihapuskannya *presidential threshold*, dan sebagainya.

Kedua, perlu ada upaya penyiapan anggaran untuk pendidikan khusus bagi calon penyelenggara pemilu. Rekrutmen calon penyelenggara pemilu harus memiliki sertifikat penyelenggara pemilu. Sertifikasi dan standarisasi bagi penyelenggara pemilu sangat berpengaruh pada kualitas pemilunya sendiri.

Ketiga, dibangun kerjasama, kemitraan dan sinergitas dengan berbagai kalangan, terutama dengan institusi yang memiliki rekam jejak sebagai peneliti pemilu, untuk bersama-sama membangun sistem yang baik sesuai kebutuhan dan kemampuan rakyat dan negara dalam membangun demokrasi ala Indonesia. [Me]



# Politik Uang Timbulkan permasalahan Bangsa **TOLAK!**

~~Kemiskinan~~

~~Korupsi~~

~~Kolusi~~

~~Nepotisme~~

~~Kerusakan Moral~~

Tempat Sampah



Sukses Pemilu 2014

FERRY KURNIA RIZKIYANSYAH

# Perjuangkan Demokrasi Sejak Mahasiswa

Jauh sebelum menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ferry Kurnia Rizkiyansyah sangat konsen dengan isu-isu yang terkait dengan proses demokratisasi, kebijakan publik, juga proses pemilihan umum.



SEJAK mahasiswa, pria yang lahir di Bandung pada 21 Februari 1975 ini menjadi aktivis demokrasi. Diantaranya dengan melibatkan diri dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Aktivitas dalam organisasi mahasiswa Islam pertama dan terbesar di Indonesia itu dijalani dengan penuh kesungguhan. Tak heran, ia terpilih menjadi Ketua HMI Cabang Jatinangor.

Selain di HMI, Ferry juga aktif dalam organisasi intra kampus. Ia pernah tercatat sebagai Ketua Umum Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran. Dengan jabatan ini, ia kerap melakukan *hearing* di parlemen, terutama terkait dengan isu politik dan persoalan pemilu. Ketika Reformasi bergulir, dan pemilu pertama dilakukan pada 1999, Ferry sudah terlibat dalam aktivitas pemilu. Dalam pemilu itu ia

aktif sebagai pemantau dari HMI.

Setelah berpengalaman jadi pemantau, Ferry pun mantap menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Ia tercatat sebagai anggota KPU Provinsi Jawa Barat pada 2003-2008. Saat menjadi anggota KPU Jawa Barat, Ferry benar-benar menjadi sosok yang independen. Ia, yang terbiasa bergaul dengan banyak jaringan, benar-benar membebaskan diri dari kerangka dan pola patron-klien. Di Jawa Barat, ia membuktikan benar-benar mandiri dan profesional.

Independensi, kemandirian serta sikap yang bebas dari pola patron-klien itu akhirnya mengantarkan Ferry ke jenjang

yang lebih tinggi. Ferry dipercaya menjadi Ketua KPU Provinsi Jawa Barat pada 2008-2013. Dalam Pemilu 2014, Ferry pun tercatat sebagai anggota KPU RI. Di KPU Pusat ini, Ferry terus mengupayakan agar proses demokratisasi berjalan sebagaimana harapan publik selama ini di satu sisi, dan di sisi lain benar-benar menghadirkan pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Ferry, bersama komisioner lain, berjuang menebar kebijakan berwujud transparansi, akuntabilitas, aksesibilitas hak pilih, dan kemandirian penyelenggara pemilu.

Untuk mewujudkan tekad ini, Ferry juga memadukan pengalaman dan pendidikan. Perlu dicatat, Ferry merupakan doktor Ilmu Sosial dari FISIP Universitas Padjajaran, setelah sebelumnya meraih gelar master dalam bidang Perencanaan Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Kedua gelar pascasarjana ini menandakan kapasitas dan kapabilitas Ferry. Pengalaman dan gelar akademik itu menempatkan Ferry menjadi sosok yang otoritatif bicara pemilu dan kebijakan publik. Dan faktanya, Ferry juga menjadi sosok yang cerdas dalam menghubungkan persoalan kultural dan struktural pada kerja demokrasi prosedural.

Ferry sadar, dirinya hadir di Pemilu 2014 tak hanya untuk menjembatani warga

**Sejak mahasiswa, pria yang lahir di Bandung, 21 Februari 1975 ini menjadi aktivis demokrasi.**



dan lembaga. Ada harapan kuat dan besar dari publik agar KPU bisa menyelenggarakan pemilu secara benar-benar jujur dan adil.

Dalam proses Pemilu 2014, dengan kemampuan membuat jaringan, Ferry mendekati lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang selama ini konsen terhadap isu-isu pemilu dan demokratisasi. Ia juga mendorong agar dioptimalkan peran-peran lembaga anti-korupsi. Tujuannya adalah agar pemilu benar-benar lebih transparan dan akuntabel.

Bagi Ferry, pemilu dan pesta demokrasi haruslah dijalankan dengan partisipasi. Bila tidak, maka yang terjadi hanyalah mobilisasi, yang secara ideal mematkan kreatifitas dan keterlibatan aktif warga,

serta membunuh pendidikan politik.

Maka, Ferry bertekad memaksimalkan prosedural demokrasi ini agar bisa menjangkau semua orang, namun di saat yang sama harus juga menyaring peserta dan menghasilkan pemerintahan yang demokratis.

Dari sisi ketegasan, KPU menerbitkan PKPU Dana Kampanye. PKPU ini merupakan semacam sikap atas UU 8/2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang tak memberikan sanksi kepada peserta pemilu yang tak melaporkan dana kampanye. Dalam hal ini, Ferry sering menemui LSM pemilu dan antikorupsi untuk bisa membuat kemungkinan-kemungkinan aturan yang bisa memaksa peserta pemilu melaporkan dana kampanye.

Ferry sendiri berpandangan, KPU harus terus memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, bahwa demokrasi merupakan jembatan menuju kesejahteraan. Demokrasi untuk kesejahteraan dicapai dengan memilih peserta pemilu yang baik, dan tidak korup.

Selaku Komisioner KPU, Ferry meyakini kerja keras dan komitmen yang kuat akan berdampak pada pemilu yang semakin baik. Ada keterkaitan antara kualitas penyelenggaraan pemilu dengan tingkat kedekatan masyarakat dengan pemilu. Dampak pemilu yang baik, dirasakan baik, berdampak baik, itu yang akan kemudian menjadi penilaian masyarakat kepada KPU sehingga pemilu menjadi lebih disukai. [Yan]



REFLY HARUN

# Menuangkan Cinta Lewat Kritik

Refly Harun bukanlah nama yang asing bagi sementara rakyat Indonesia. Lebih-lebih bagi mereka yang selama ini ikut larut dan memperhatikan dinamika politik dan ketatanegaraan Republik Indonesia.

PRIA kelahiran Palembang, Sumatera Selatan, pada 26 Januari 1970 ini dikenal sangat memahami lembaga Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan, bukan hanya memahami, Refly juga sering memantau dan mengkritisi MK sebagai tanda cintanya pada lembaga ini. Bagi Refly, kemegahan MK bukanlah digunakan untuk panggung popularitas atau pementasan cerita dramatik. Bagi dia, kemegahan MK harus dijaga agar tetap menegakkan keadilan Kontitusi, dan selalu menjadi tempat terhormat.

Dalam niat dan tekad untuk menjaga MK itulah Refly berani bersuara lantang. Dia bicara keras hingga memekakkan sementara telinga publik Indonesia yang selama ini meyakini kehormatan hakim MK. Refly bicara dengan nada jelas, tanpa tedeng



aling-aling bahwa terjadi praktek jual-beli hasil sidang sengketa pilkada di MK. Menegaskan keyakinan, Refly menulis pandangannya di harian nasional Kompas, dengan judul "Masih-

Bersihkan MK?"

Nama pria yang lulus sarjana hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) ini pun menjadi bahan perbincangan di tengah publik. Refly menjadi buah bibir dimana-mana. Terlebih lagi, sosok yang meraih gelar master hukum dari Universitas Indonesia (UI) ini pernah menjadi staf ahli MK. Menanggapi suara lantang Refly, Ketua MK saat itu, Mahfud MD membalas tulisan dengan tulisan. Di media yang sama, Mahfud menulis dengan judul "MK Minta Tolong pada Refly."

"Refly Harun adalah aktivis penegakan hukum dan demokrasi yang dikenal cerdas dan kredibel. Tentu dia tak sembarangan menulis, pasti bisa dipertanggungjawabkan. Saya sedih dan malu karena "permainan perkara" yang dilihat dan didengar Refly itu



telah terjadi di MK," tulis Mahfud MD dalam artikel opininya.

Belakangan, publik terperangah, kaget dan terkejut. Suara keras dugaan Refly itu terbukti benar. Ketua MK Akil Mochtar ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan beberapa kasus pemilihan kepala daerah. Kelakuan Akil yang menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang itu hampir sama dengan yang disampaikan Refly dalam tulisannya.

**"Potensi penyalahgunaan kekuasaan itu terjadi karena panel hakim yang terdiri dari tiga orang sangat memengaruhi, bahkan bisa dikatakan determinan terhadap putusan akhir,"**



Potensi penyalahgunaan kekuasaan itu terjadi karena panel hakim yang terdiri dari tiga orang sangat memengaruhi, bahkan bisa dikatakan determinan terhadap putusan akhir. Hal ini terjadi karena enam hakim lainnya sama sekali tidak terlibat dalam pemeriksaan perkara.

Refly, yang menggondol gelar master hukum dari University of Notre Dame, Amerika Serikat pada 2007, lagi-lagi menyampaikan kritik sebab dampak dari kasus Akil Mochtar itu banyak pihak menggugat kewenangan MK dalam menangani perkara pilkada. Atas gugatan itu, MK mengabulkan

permohonan agar MK tak lagi menangani sengketa hasil pilkada. Dengan putusan MK tersebut, Refly menilai MK lari dari tanggung jawab, dan cuma bersandar pada tafsir tekstual. MK pun gagal memahami fungsinya sebagai *the guardian of constitution* dan sebagai penjaga demokrasi.

Refly mencatat, sekaligus mengingatkan, alasan ia serta kalangan aktivis pemilu dan demokrasi berupaya memindahkan kewenangan sengketa pemilu, termasuk pilkada ke MK. Sebab banyak penyelesaian masalah yang justru menjadi masalah baru di MA.

Refly kembali membuka salah satu akar persoalan. Selama ini ada kesalahan dalam menyidangkan sengketa pemilu dan pilkada. Seolah-olah pilkada bertumpu hanya di MK saja. Padahal seharusnya, secara sistemik, pemilu Indonesia harus memperbaiki sistem penanganan sengketa-sengketa pemilu mulai dari level bawah.

Refly pun mendorong agar fungsi ajudikasi Bawaslu semakin dioptimalkan. Bawaslu pun lebih tepat berganti nama menjadi Badan Penyelesaian-Sengketa Pemilu. [Yan]



## Pelantikan Lima Komisiner KPU Provinsi Lampung

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik resmi melantik lima anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung periode 2014-2019. Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Lantai 1 Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol No.29, Jakarta Pusat, Rabu (15/10).

Hadir dalam pelantikan tersebut Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim, Komisiner Sigit Pamungkas dan para pejabat eselon II dan III di lingkungan Setjen KPU RI.

Kelima anggota KPU Provinsi Lampung yang dilantik tersebut adalah Dra. HandiMulyaningsih, M.Si ; Sholihin, S.Pd.I., MH; Dr. Nanang Trenggono, M.Si; AhmadFauzan, S.Fil.I., MA;

dan Muhammad Tio Aliansyah, SH., MH.

Penetapan mereka berdasarkan Keputusan KPU Nomor 588/Kpts/



KPU/Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Periode 2014-2019.

Usai penandatanganan pakta integritas penyelenggara Pemilu, Husni Kamil Manik secara khusus meminta anggota KPU Provinsi Lampung untuk segera melakukan konsolidasi kepada *stakeholder* penyelenggaraan pemilu.

“Saya ucapkan selamat kepada para anggota yang baru saja dilantik. Dengan kepemimpinan yang baru ini saya meminta setiap jajaran KPU Provinsi Lampung untuk segera melakukan konsolidasi dengan seluruh *stakeholder* penyelenggaraan pemilu,” kata Husni berpesan.

Husni berharap jajaran KPU di provinsi dapat melakukan pembelajaran dan melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan Pemilu. Hal ini penting guna meningkatkan komitmen KPU dalam menyelenggarakan Pemilu yang jujur dan adil.

“Pembenahan dan evaluasi internal

sudah layak kita jadikan prioritas. KPU provinsi diharapkan menjalankan supervisi dan koordinasi dengan jajarannya untuk membangun kelembagaan penyelenggaraan Pemilu yang profesional,” lanjut Husni.

Mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar tahun 2015 mendatang, Husni meminta anggota KPU Provinsi Lampung untuk terus merapatkan barisan dan menjalankan tahapan Pemilu sesuai dengan yang sudah direncanakan.

“Pilkada akan berlangsung pada 2015, meskipun Perppu tentang pemilihan kepala daerah masih harus dibahas lebih lanjut, tetapi kita harus siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Saya berharap KPU Lampung dapat menjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan kelompok sipil lainnya untuk mempersiapkan tahapan Pemilu,” ujarnya.

Husni mengatakan, Provinsi Lampung telah melaporkan penyelenggaraan Pemilu serentak DPR, DPD, dan DPRD bersamaan dengan Pemilihan Gubernur Tugas KPU melakukan pen-

dalam dan analisis masalah serta membuat penyelesaiannya.

“Segera konsolidasi internal dengan jajaran anggota dan sekretariat untuk mencapai misi besar KPU dalam penyelenggaraan Pemilu yang profesional, kredibel dan kapabel,” pungkask Ketua KPU-RI.

Sebelumnya, Tim Seleksi KPU Lampung menetapkan sepuluh besar calon anggota KPU Lampung untuk mengikuti tahap berikutnya, fit and proper test oleh KPU RI.

Mereka adalah Ahmad Fauzan (dosen), Banon Eko Susetyo (dosen), Erlina (anggota KPU Lampung Selatan), Firman Seponada (anggota KPU Provinsi Lampung), Handi Mulyaningsih (anggota KPU Provinsi Lampung), M. Tio Aliansyah (anggota KPU Lampung Utara), Nanang Trenggono (ketua KPU Lampung), Sholihin (anggota KPU Provinsi Lampung), Sudyanto (swasta), Sholihin (anggota KPU Provinsi Lampung), Sudyanto (swasta), dan Syafnijal Datuk Sinaro (wartawan). [Yan]

**“Pembenahan dan evaluasi internal sudah layak kita jadikan prioritas. KPU provinsi diharapkan menjalankan supervisi dan koordinasi dengan jajarannya untuk membangun kelembagaan penyelenggaraan pemilu yang profesional,”**



## Rapim Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2014 di Istana Negara

Rapat pimpinan (Rapim) Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 dilaksanakan di Aula Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, awal Oktober. Dari pihak penyelenggara hadir komisioner KPU RI dan jajarannya, para ketua KPU seluruh Indonesia, pimpinan dan anggota Badan Pengawas Pemilu RI.

SEMENTARA dari pemerintah, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto serta para petinggi TNI dan Polri.

KPU RI juga telah menggelar rapat evaluasi penyelenggaraan Pemilu bersama para anggota DPR Komisi II Periode 2009-2014 di Bandung, awal Oktober lalu. Dihadiri pula pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara Refomasi Birokrasi, Profesor Eko Prasodjo, Kepala Badan Pertanahan RI, Ombudsman, Ketua Bawaslu RI, Kepala Badan Kepegawaian Negara,



serta Kepala Arsip Nasional. "Alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi bersama untuk membulatkan semangat dan tekad untuk menyelenggarakan Pemilu dengan sebaik-baiknya serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu pada waktu yang akan datang," pesan Presiden SBY.

Presiden SBY mengemukakan, sebenarnya sudah lama mengharapkan momentum pertemuan dengan penyelenggara Pemilu. Namun ia menyadari perlu waktu yang tepat sehingga penyelenggaraan Pemilu 2014 tetap berjalan independen, mandiri, dan bebas dari intervensi mana pun.

"Saat Pak Husni (Ketua KPU RI) meminta bertemu, senang hati saya menerima. Memang saya ingin bertemu langsung, dan inilah saat yang tepat karena dalam beberapa saat lagi masa jabatan saya telah usai," tuturnya melanjutkan.

Presiden SBY bisa memahami memang tidak mudah untuk menyelenggarakan Pemilu. Banyak cobaan dan tantangan yang harus dihadapi KPU selaku penyelenggara.

"Saya tahu karena saya menjadi salah satu pelaku Pemilu. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada penyelenggara pemilu yang berhasil menggelar Pemilu secara lancar, fair dan *free of interest election*," kata Presiden SBY.

Dalam kesempatan itu, Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik menyatakan bahwa terselenggaranya Pemilu 2014 berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil tak lepas dari dukungan Presiden SBY.

Atas nama penyelenggara Pemilu seluruh Indonesia, Ketua KPU RI pun menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden SBY yang telah membantu dan bersikap

demokrat dalam pelaksanaan Pemilu.

"Segenap keluarga besar KPU berterima kasih kepada Presiden SBY yang berkenan menerima dan secara resmi membuka Rapim Evaluasi," ucap Ketua KPU RI.

Ketua KPU RI menjelaskan, Rapim ini dimaksudkan untuk membangun persepsi yang sama dalam memahami evaluasi terkait proses penyelenggaraan Pemilu tahun 2014. Ia juga menekankan pentingnya pertemuan KPU seluruh Indonesia dengan pemerintah bisa terlaksana.

"Pertemuan ini penting dan strategis mengingat KPU di setiap tingkatan wajib melakukan evaluasi dan membuat laporan dalam setiap tahapan Pemilu," terangnya.

Rapim ditutup oleh Presiden SBY dengan memukul gong sebanyak lima kali sebagai simbolisasi jumlah sila dalam Pancasila. **[Wid]**

**"Pertemuan ini penting dan strategis mengingat KPU di setiap tingkatan wajib melakukan evaluasi dan membuat laporan dalam setiap tahapan Pemilu,"**

# KPU Bahas Penyelenggaraan Konferensi Internasional Disabilitas dan Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar audiensi dengan lembaga swadaya masyarakat yakni Agenda, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), dan International Foundation for Electoral Systems (IFES), di Ruang Rapat lantai I KPU, Kamis (9/10).



LEMBAGA-lembaga itu hadir guna membahas rencana penyelenggaraan konferensi internasional dengan tema seputar isu disabilitas dan pemilu. Koordinator Nasional JPPR Afifuddin menerangkan, konferensi tersebut merupakan kegiatan tahunan yang sebelumnya telah dua kali dilaksanakan.

“Salah satu aktivitas besarnya adalah launching hasil monitoring Pilpres 9 Juli 2014 lalu, yang telah kami lakukan di lima provinsi, yaitu di Jakarta, Jawa-Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Aceh,” kata Afif.

Konferensi tersebut, lanjut Afif, nantinya akan menjadi bagian dari

promosi praktik terbaik pemilu yang ada di Indonesia kepada kalangan internasional, baik dari sisi penyelenggara, kelompok sipil, peneliti dan sebagainya.

Ia juga mengatakan bahwa praktik aksesibilitas pemilu di Indonesia lebih maju dibanding negara lain, baik dari segi peraturan dan lain sebagainya. KPU menyambut baik kegiatan yang akan digelar pada Januari 2015 mendatang itu.

“Tentu ini agenda yang baik, yang tidak hanya KPU harus dorong, tapi sebenarnya bisa diperluas juga. Karena isu disabilitas ini kan tidak hanya

terkait dengan Pemilu, tapi juga bisa berkaitan dengan isu pembangunan dan sebagainya,” kata Komisioner KPU Sigit Pamungkas.

Selain melibatkan tiga lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia (KPU, Bawaslu, dan DKPP), konferensi internasional ini rencananya juga akan melibatkan universitas serta KPU (lembaga-lembaga penyelenggara pemilu) dari negara lain. **[Wid]**

**“Salah satu aktivitas besarnya adalah launching hasil monitoring Pilpres 9 Juli 2014 lalu, yang telah kami lakukan di lima provinsi, yaitu di Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Aceh,”**



## KPU Kepulauan Meranti Studi Banding ke Klungkung

Dalam kadar tertentu, studi banding memang merupakan satu keniscayaan. Dengan studi banding itulah, pengalaman baik yang berbeda bisa menjadi rujukan. Dengan studi banding juga, ilmu dan wawasan bisa ditimba dari tempat yang berbeda.

ATAS dasar itu, Komisioner KPU Kabupaten Meranti, Kepulauan Riau, beserta jajarannya melakukan studi banding Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Klungkung, Bali, September lalu.

Bukan tanpa alasan memilih Klungkung. Pasalnya, pelaksanaan Pilkada untuk tingkat kabupaten yang paling akhir di wilayah ini dan dianggap berjalan sukses. Bahkan, tidak ada jadwal yang melenceng dari yang telah diagendakan. Mulai dari masa persiapan, anggaran, pelaksanaan sampai penyelesaian, berupa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati. Bahkan, tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pilkada ini. Tentu saja ini menjadi perhatian menarik bagi KPU Meranti.

“Prestasi ini menjadi titik tolak kenapa dipilihnya KPU Kabupaten Klungkung sebagai objek dalam studi banding KPU Meranti,” jelas Kepala Sub Bagian

Hukum KPU Kabupaten Meranti, Fresly.

“Daerah Meranti hampir mirip dengan geografis Kabupaten Klungkung. Dari jumlah penduduk juga hampir sama, serta pemilih. Klungkung punya Nusa Penida, Lembongan, Ceningan, sedangkan Meranti juga cukup banyak daerahnya kepulauan,” tambah Fresly.

Dalam kunjungan studi banding itu, KPU Meranti mengikutsertakan seluruh komisioner dan staf sekretariat. Rombongan yang berkisar 30 orang ini diterima langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Klungkung I Made Kariada, SE, SH didampingi oleh anggota KPU Provinsi Bali, seluruh anggota komisioner, sekretaris, kasubag serta staf di Ruang Rapat KPU Kabupaten Klungkung.

I Made Kariada memaparkan, Klungkung memang kabupaten yang wilayahnya cukup kecil dibanding ka-

bupaten lain di Bali, namun mempunyai daerah kepulauan yang harus disikapi dengan bijaksana, terutama dalam distribusi logistik, agar tidak terlambat dan sesuai jadwal.

KPU Kabupaten Klungkung, beber I Made Kariada, mempersiapkan semua secara sangat matang dari penyusunan jadwal dan kegiatan sampai ke hal-hal kecil, sehingga tidak mengganggu bahkan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kegiatan-kegiatan masyarakat, terutama adat dan budaya lokal, juga diperhatikan sebelum menentukan hari pemungutan suara.

“KPU Kabupaten Klungkung memohon hari baik kepada Pendeta Hindu yang sangat mengerti akan hari dan waktu baik,” kata I Made Kariada pula.

Bali tidak bisa dipisahkan dengan budaya, begitu juga dalam penyelenggaraan kegiatan dan tahapan Pilkada. Di hari pemungutan suara seluruh penyelenggara memakai pakaian adat. Sama halnya dengan pemilih. Jadi Pemilu di Klungkung selain menegakkan demokrasi juga melestarikan budaya.

Rombongan setelah diterima secara resmi langsung diarahkan menuju ruang Kasubag sesuai dengan yang ditangani untuk mendapat data yang diperlukan. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan souvenir.

KPU Klungkung menyerahkan Buku Laporan Kegiatan Pemilu Kada tahun 2013 dan lukisan khas Kamasan yang sudah terkenal. KPU Kabupaten Meranti mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi kepada KPU Kabupaten Klungkung, karena bisa menerima dan bahkan memberikan data yang diperlukan dalam menunjang Pilkada di Kabupaten Meranti. **[Wid]**

**“Prestasi ini menjadi titik tolak kenapa dipilihnya KPU Kabupaten Klungkung sebagai objek dalam studi banding KPU Meranti,”**



## KIP Aceh Gelar Pelatihan Tata Kelola Media Center

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) bersama KIP Aceh mengadakan pelatihan mengelola Media Center untuk sekretariat Komisi Independen Pemilu (KIP) Aceh, Senin (13/10).

PENGELOLAAN Media Center KIP Aceh diharapkan akan dapat terus untuk mendukung segala proses sosialisasi kinerja dan kegiatan seputar Pemilu yang dianggap sangat penting, khususnya menyongsong pelaksanaan Pilkada Aceh yang direncanakan pada tahun 2017 mendatang.

Acara yang dilaksanakan selama tiga

hari tersebut diikuti oleh lima orang staf yang bertugas di bagian Humas sekretariat KIP Aceh. Adapun tutor materi kehumasan pada kegiatan tersebut disampaikan oleh Nurdin Hasan, materi penulisan oleh Adi Warsidi dan Fakhurradzie M Gede, serta materi pengelolaan website oleh Kusnandar dan Zahrul Maizi. **[Mel]**

## KPU Jateng Tunda Persiapan 17 Pilkada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah menghentikan sementara persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 17 kabupaten/kota di Jateng yang akan digelar pada 2015.

KPU JATENG masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut terkait dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD.

"Kita masih menunggu petunjuk teknis dari pusat," kata Ketua KPU Jateng Joko Purnomo.

Alasan lainnya persiapan Pilkada di 17 kabupaten/kota dihentikan, karena menyangkut penggunaan anggaran pada APBD 2014.

"Beberapa kabupaten/kota sudah menganggarkan biaya Pilkadanya melalui APBD 2014. Tapi belum akan dibelanjakan karena Pilkada melalui apa belum jelas," terangnya.

KPU Jateng akan mengikuti aturan positif yang berlaku terkait dengan mekanisme pelaksanaan pemilihan

kepala daerah.

Di Provinsi Jateng terdapat 17 kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada pada 2015 yaitu Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kendal, Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Pemalang.

Enam dari 17 daerah tersebut yakni Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, dan Kota Surakarta akan menyelenggarakan Pilkada pada Mei 2015 karena akhir masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Juli 2015. **[Wid]**



**"Kita masih menunggu petunjuk teknis dari pusat," kata Ketua KPU Jateng Joko Purnomo.**

## KPU Menerima Penghargaan Lembaga Publik Terpercaya

Jalan panjang dan melelahkan setelah berkutat dalam kewajiban menegakkan konstitusi negara di pemilihan legislatif dan presiden, akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapat penghormatan yang layak dari masyarakat.

DI LUAR dugaan masih dalam suasana politik yang progresif namun terkendala, pimpinan KPU menerima undangan dari salah satu organisasi perusahaan penerbitan pers terkemuka di negeri ini yakni Serikat Perusahaan Pers (SPS), di The Rich Hotel Yogyakarta, Jum'at (17/10) lalu.

KPU diundang SPS untuk menghadiri penerimaan penghargaan dari salah satu lembaga swadaya masyarakat yang sangat konsen memperhatikan sepaik terjang lembaga pemerintah dalam menjalankan kewajibannya untuk melayani rakyat dengan baik.

Ya, nama lembaga itu *Indonesia Public Relation Awards and Summit* atau disingkat IPRAS. Di kalangan aktifis dan pemerhati politik nama IPRAS sudah tidak asing lagi. Kelayakan KPU menerima penghargaan sebagai lembaga publik terpercaya

sudah melalui mekanisme dan penelitian mendalam, yang melibatkan seluruh pihak-pihak terkait. Dedikasi KPU dalam keberanian mengambil keputusan berdasarkan data-data dan fakta terukur menjadi salah satu penilaian tersendiri IPRAS.

KPU menerima penghargaan ini setelah melalui pengamatan

lebih dari 100 lembaga publik yang menjadi nominasi. KPU dinilai layak mendapat penghargaan sebagai lembaga publik yang memiliki tingkat keper-

cayaan tinggi di mata masyarakat, serta inovasi dan kebijakan yang dijalankan sangat krusial dan strategis. **[Yan]**



## Walikota Surabaya Puji KPU

Risma mengaku tak menyangka terobosannya selama memimpin Surabaya diapresiasi perusahaan media.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjadi salah satu dari tiga tokoh publik penerima penghargaan dari Serikat Perusahaan Pers (SPS) 2014.

Wanita tangguh yang tegas memimpin kota Surabaya itu terpilih sebagai tokoh publik penerima penghargaan SPS bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik.

Menurut Risma, penghargaan itu memacunya semakin giat mengabdikan bagi warga Surabaya. Dia mengatakan akan terus berupaya mendengar suara warga untuk memastikan efektivitas kebijakan Pemerintah Kota Surabaya.



"Masih banyak yang perlu diperbaiki," katanya.

Risma dan Husni hadir saat penyerahan penghargaan. Penyerahan penghargaan itu sekaligus menutup rangkaian acara Indonesia Public Relations Awards and Summit (IPRAS) ketiga dan Indonesia Media Research

Awards and Summit (IMRAS) pertama yang digelar oleh SPS Pusat pada 16-17 Oktober 2014.

Dalam kesempatan itu, Tri Rishamarini sangat mengapresiasi peran dan kinerja KPU. "Sudah baik. Ke depan perlu ditingkatkan lagi," ujar Tri sambil tersenyum manis. **[Wid]**





## KPU RI Apresiasi Kinerja KPU DIY

Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 termasuk dinilai baik. Hal ini antara lain dapat diukur dari tidak adanya sengketa hasil Pileg di Mahkamah Konstitusi, juga ditolaknya gugatan pemohon dalam perselisihan Hasil Pilpres.

Demikian disampaikan Komisioner KPU RI, Sigit Pamungkas dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait evaluasi pelaksanaan pelaporan dana kampanye dan perselisihan hasil Pemilu (PHPU) legislatif serta Pemilu dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang diikuti komisioner KPUD DIY dan KPU Kabupaten/Kota se-DIY, unsur pengurus parpol tingkat DIY serta jajaran sekretariat KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota se DIY di ruang rapat KPU DIY, Jumat (10/10).

Dalam kegiatan FGD dengan moderator Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan, S.IP.M.Si tersebut, para pengurus

partai politik diminta untuk menyampaikan penilaian terhadap kinerja KPU DIY termasuk KPU Kabupaten/Kota se DIY dalam memberikan layanan pelaporan dana kampanye pada khususnya, serta pelayanan penyelenggaraan Pemilu pada umumnya. Hal ini mengingat untuk pelaporan dana kampanye relatif sulit dalam pengisiannya.

Beberapa pengurus parpol menyarankan agar pada Pemilu akan datang untuk pelaporan dana kampanye dibuat lebih sederhana serta menggunakan aplikasi yang memudahkan dalam penyusunannya.

Sementara untuk pengaturan jadwal kampanye disarankan agar KPU dapat menyusun lebih cermat supaya tidak terjadi adanya waktu yang bersamaan antara parpol satu dengan lainnya.

[Wid]

**“Beberapa pengurus parpol menyarankan agar pada Pemilu akan datang untuk pelaporan dana kampanye dibuat lebih sederhana,”**

SIGIT KWARTIANTO - ANGGOTA KPU CILACAP

## Anggota KPU yang Dianggap Caleg

TAK TERPIKIR sebelumnya bagi Sigit Kwartianto untuk menjadi anggota KPU Kabupaten Cilacap. Ia hanya berpikir dan mau suara pemilih bisa berkualitas dan dapat terakomodasi. Di lapangan selama ini, ia masih melihat ada surat suara yang tidak sah, dan pemilih tidak sepenuhnya mengetahui dan memahami apa dan siapa yang dipilih. Bahkan, sementara pemilih terganggu karena bilik suara tidak benar-benar bisa menjaga privasi. Ini juga yang ia temukan ketika menjadi anggota KPU Kabupaten Cilacap.

Di sisi lain, hal yang terjadi di komisioner KPU kabupaten cukup unik bagaimana harus mengorganisir penyelenggara Pemilu di bawahnya yang sifatnya *ad hoc*. Sebab anggota PPK juga banyak yang memiliki kedudukan seperti pengawas sekolah, guru, dosen, PPL, pengusaha, pensiunan, tokoh masyarakat, tokoh agama. Dari usia, banyak yang berusia tua dan telah berkali-kali menjadi anggota PPK.

“Kita harus bisa mulur mungkrut, luwes, bisa ngelus dan ngeluk, mengambil empati, harus tepat ketika saatnya untuk tegas. Mereka merasa, menjadi anggota PPK adalah pengabdian, karena tidak banyak orang yang mampu dan mau mirip dengan ketua RT,” katanya.

Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Jawa Tengah, dengan jumlah TPS terbanyak di Jawa Tengah; 4.404 untuk pileg dan 3.232 untuk Pilpres.

Jumlah Lembaga Pemasarakatan juga terbanyak di Jawa Tengah, yaitu delapan LP; Tujuh LP di Pulau Nusakambangan dan 1 di Cilacap Kota sehingga ketika terjadi kekurangan surat suara harus mengambil surat suara di TPS terdekat, sulit dilakukan, karena TPS terdekat yang memungkinkan ada di seberang pulau. Sedangkan penghuni LP bersifat dinamis, keluar masuk.



Hal yang unik bagi Sigit, ketika melakukan sosialisasi di semua LP Pulau Nusakambangan adalah atensi mereka sangat tinggi terhadap Pemilu. Mereka berebut untuk membaca buku dan brosur sosialisasi.

“Maklum mereka juga haus bacaan dan informasi. Di luar dugaan saya, mereka berkata, ‘Saya akan coblos bapak, bapak partai mana dan nomor urut berapa?’ ‘Waduh...!’” katanya.

## “Kepuasan menjadi penyelenggara pemilu adalah ketika dapat melaksanakan tugas dengan tidak berpikir siapa yang menang,”

Sebagai komisioner KPU Kabupaten, secara struktural, Sigit memastikan ia tunduk pada struktur di atasnya yaitu KPU Provinsi. Kenyataan yang terjadi, ia juga harus siap melaksanakan perintah dari atas, sementara saat meneruskan perintah ke bawah kadangkala di bawah mengeluh.

“Hal ini, bagi saya bukan persoalan, tetapi ini seni, menyenangkan dan unik. Karena bagi saya kesulitan bisa kita nikmati, kesedihan dapat dinikmati, kebahagiaan ketika dapat menyelesaikan dan telah berlalu dan dimanapun akan ditemui masalah.

Kenangan manis adalah bukan mengenang peristiwa indah, tetapi mengenang peristiwa pahit, dan saat mengenang sudah usai kepahitannya. Saya yakin dengan kekuatan pikir yang terwujud dalam usaha dan doa semua kesulitan akan teratasi, semesta juga akan mendukung,” katanya.

Hampir setahun menjadi komisioner KPU Kabupaten Cilacap, Sigit merasakan beberapa hikmah yang didapat tanpa harus mencari. Hikmah itu misalnya, kepuasan menjadi penyelenggara Pemilu adalah ketika dapat melaksanakan tugas dengan tidak berpikir siapa yang menang.

Kedua, lanjut Sigit, memanusiaikan manusia. Manusia diakui kemanusiaannya secara riil adalah ketika menjadi pemilih dalam Pemilu. Siapapun menggunakan hak pilihnya masuk kategori DPKTb, maka diberikan hak mencoblos satu jam terakhir.

Hikmah ketiga adalah memahami orang lain. “Apa yang kita pikirkan mudah, belum tentu bagi orang lain mudah, contohnya dalam mencoblos. Jadi, kita tidak bisa mengukur diri sendiri untuk diterapkan orang lain,” ungkapnya.

Keempat, ikhlas dan profesional. Ikhlas



dan profesional dalam menjalankan tugas akan muncul ketika sudah menjalaninya.

“Dianalogikan gula akan terasa manis apabila kita mencicipinya, apabila hanya dipandang tidak akan terasa manis. Kita menjalankan tugas secara profesional dan netral dengan ditandai kebahagiaan ketika menjalankan tugas dengan baik sesuai aturan, siapapun yang jadi. Akhirnya keikhlasan yang akan kita dapatkan,” jelasnya.

Hikmah kelima, masih kata Sigit, dalam analogi waktu yang diterapkan dalam tembang Jawa mulai dari Maskumambang sampai Megatruh dan Pucung sesuai dengan tugas sebagai komisioner KPU Kabupaten, mulai Maskumambang pada tahap seleksi masuk sampai Megatruh dan ketika selesai menjadi anggota KPU Kabupaten.

“Keenam, keikhlasan akan kehilangan, penyelenggara Pemilu maupun peserta

Pemilu baik parpol, caleg, calon presiden dan wakil presiden, cagub dan cawagub, cabup dan cawabup harus ikhlas kalau jabatan sudah berhenti atau tidak terpilih dalam pemilu,” jelasnya lagi.

Ketujuh, belajar dari bawah. Kita belajar berdemokrasi dari pemilihan Ketua RT atau pemilihan OSIS di sekolah. Kedelapan, belajar berorganisasi; Bagaimana menjadi bawahan KPU Propinsi, serta bagaimana mengorganisir penyelenggara Pemilu yang sifatnya *ad hoc* mulai dari PPK, PPS dan juga KPPS.

Kesembilan, belajar sabar sebab komisioner adalah kerja kolektif kolegial. Kesepuluh, bekerja dan belajar tidak mengenal batasan waktu. Sebagai komisioner, Sigit harus selalu belajar hal yang baru dan teknis, tanpa mengenal waktu. [Wid]

DINA OCTAVIANA - PETUGAS KPPS DKI JAKARTA

# Disambut Guguk Hingga Ketiban Curcol

MENJADI petugas pemilihan umum bukanlah hal baru bagi wanita cantik ini. Tepatnya pada 9 April 2014 lalu, pada perhelatan Pemilu Legislatif, wanita bernama Dina Oktaviani

diselenggarakan pada Februari 2013.

**Disambut Guguk**

Mendistribusikan formulir C6 sebagai undangan Pemilu secara *door-to-door* alias dari pintu ke pintu

ini sudah keempat kalinya menjadi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Pertama kali saya bertugas sebagai anggota KPPS adalah saat acara Pilgub DKI pada Juli 2012, kemudian dilanjutkan dengan Pilgub putaran kedua pada September 2012,” ujarnya mengawali.

Wanita lulusan Universitas Indonesia Fakultas Sastra Jurusan Perancis ini tinggal di kompleks purnawirawan di wilayah perbatasan antara provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Hal itulah yang membuatnya kembali ditunjuk menjadi anggota KPPS untuk ketiga kalinya, yaitu untuk Pilgub Jawa Barat yang



menjadi pengalaman tersendiri bagi wanita yang juga penulis ini. Menurutnya, membagikan formulir dari rumah ke rumah lebih praktis dengan berjalan kaki dari pada naik motor.

Rata-rata rumah yang berada di kompleks tempat Dina bertugas berukuran besar dengan luas tanah berkisar antara 450-600 meter persegi. Tak sedikit yang berlantai dua.

Beruntungnya sebagian rumah dilengkapi bel. Dan lebih bagus lagi jika belnya masih baru, lagunya panjang dan bunyinya nyaring. Sekali pencet, biasanya tak sampai 10 detik si empunya rumah keluar dari dalam rumah. Jika lewat dari 10 detik

“Pertama kali saya bertugas sebagai anggota KPPS adalah saat acara Pilgub DKI pada Juli 2012, kemudian dilanjutkan dengan Pilgub putaran kedua pada September 2012,”

## “Maklum rumah-rumah yang tergolong segede Gaban (besar) ini rata-rata pagarnya tinggi dan tertutup rapat. Yang suka bikin kaget adalah rumah-rumah yang memakai bel hidup,”

belum juga ada reaksi, biasanya Dina akan memencet bel tiga kali berturut-turut.

Namun ada rumah yang menggunakan genteng atau kliningan sebagai ganti bel. Tapi banyak juga rumah yang tanpa bel, genteng, kliningan, atau sebangsanya; atau yang belnya matot alias mati total.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Dina berbekal alat pembuka tutup botol untuk diadu dengan pagar sambil dibarengi teriakan.

“Maklum rumah-rumah yang

tergolong segede Gaban (besar) ini rata-rata pagarnya tinggi dan tertutup rapat. Yang suka bikin kaget adalah rumah-rumah yang memakai bel hidup.

Bel jenis ini biasanya tak terlihat karena terhalang pagar yang tinggi atau tertutup. Tahu-tahu begitu kita mengetuk pagar, dia langsung berbunyi dengan heboh. “Guk! Guk! Guk! Guk guk guk guk!!!” ujarnya tertawa.

Bagi Dina juga, berkeliling mengantarkan formulir C6 menjadi ajang silaturahmi dengan warga

sekompleks yang kebanyakan merupakan teman-teman orangtua Dina. Rata-rata usia mereka sudah sepuh dan kesehatan mereka kian rapuh. Sebagian dari mereka tak begitu mengenal Dina.

Namun begitu Dina menyebutkan nama orang tuanya barulah mereka tahu siapa Dina sebenarnya.

Setelah tahu, ada beberapa yang curhat, ada yang curhat tentang anak mereka yang telah meninggal, ada pula yang curhat tentang pacar pertamanya yang kini dikenal sebagai sastrawan senior ternama negeri ini.

Ada yang curhat mengenai tetangga sebelah, yang punya kebiasaan mencuci mobil di jalanan dan tetap ‘ndableg’ meski sudah berkali-kali diberitahu bahwa kebiasaan itu bisa merusak struktur aspal. Curcol alias curhat colongan alias curhat yang tak disengaja menjadi santapan Dina dalam menjalankan tugas mulia tersebut. [Mei]



## Evaluasi Pemilu di Luar Negeri, KPU Libatkan *Multistakeholders*

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI mulai September melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilihan presiden (Pilpres) 2014 ke luar negeri selama dua bulan secara menyeluruh. Terdapat 30 PPLN yang akan menjadi obyek evaluasi. Evaluasi ini melibatkan sejumlah lembaga selain KPU yakni Kementerian Luar Negeri RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bappenas, BPPK dan Dirjen Anggaran.



“Harusnya kita ke 130 PPLN, tidak usah sampel. Tapi kita memperhatikan efisiensi, memperhatikan juga kepentingan-kepentingan di dalam supaya tercover,” jelas komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Beberapa PPLN yang dikunjungi itu di antaranya Frankfurt (Jerman), Paris, Kuala Lumpur, Hong Kong, Shanghai, Sydney, Brasil, Jeddah, dan

juga Petronia (Afrika). Dijelaskan, pemilihan 30 PPLN itu dilihat dari sisi jumlah pemilihnya yang lebih banyak. Selain itu dari sisi kompleksitas penyelenggaraan Pemilu.

“Untuk tahap evaluasi ke luar negeri tahap kedua nanti tidak ada komisioner yang ikut hanya dari Kemenlu dan Kesekretariatan saja. Pertimbangannya, para komisioner memiliki

sejumlah prioritas pekerjaan di dalam negeri termasuk mempersiapkan kegiatan evaluasi pemilu di dalam negeri,” imbuh Ferry.

Di samping memperbaiki mekanisme penyelenggaraan Pemilu di luar negeri untuk ke depannya, kunjungan ini juga bertujuan mengevaluasi penerapan kebijakan baru, seperti *early voting* dan *drop box*. [Wid]



## Ikut Meramaikan Pesta Demokrasi Dari Sevilla dan Belgia

Surat suara dikirim via pos. Begitulah salah satu dari tiga cara bagi WNI yang tinggal di luar negeri untuk bisa berpartisipasi dalam Pemilu 2014. Dua cara lainnya yang difasilitasi oleh pemerintah RI adalah dengan memilih langsung, biasanya di KBRI atau Konjen, atau dengan dropbox yang disimpan di kantung-kantung populasi WNI di luar negeri.

SEBAGIAN besar pemilih di LN biasanya memilih cara berkirim pos, terutama yang tinggal di kota yang jauh dari KBRI atau tidak ada Konjen-nya. Model pos, di mana panitia pemilihan luar negeri (PPLN) mengirimkan surat suara kepada pemilih yang di dalamnya ada perangko agar mereka mengirim balik hasil coblosan. Untuk jenis ini pos dilakukan jika alamat tinggal pemilihnya jelas.

Baik yang melalui metode pos ataupun coblos langsung, perhitungannya akan dilakukan secara serentak. Karena metode pos memakan waktu lama, maka surat suara biasanya akan tiba di tangan pemilih beberapa hari sebelum hari Pemilu yang sebenarnya dimulai.

Seperti dituturkan Riani Garniati Rahayu yang menetap kini di Andalusia, tepatnya Sevilla, Spanyol sejak Oktober 2013. Melalui blognya, <http://thebrahimsfamily.com>, Riani bercerita sebetulnya ia dan

suaminya, Ibrahim Kholilul Rohman sudah terdaftar sebagai pemilih tetap di PPLN-Stockholm - Swedia. Proses pengurusan surat pindah dari Gothenburg, Swedia ke Sevilla terbilang mepet waktu mengingat jadwal tahapan Pemilu 2014.

"Alhamdulillah tidak menemui kendala karena PPLN Stockholm jauh-jauh dari sana mengirimkan surat pindah untuk kami yang sudah di Sevilla ini," tulisnya.

Lanjut Riani, surat pindah itu lalu discan dan dikirim melalui email ke PPLN Madrid. Karena tidak ada balasan, akhirnya ia dan suaminya memutuskan untuk mengikuti sosialisasi di kota terdekat, saat itu di Malaga.

"Hitung-hitung sekalian lapor diri dan liburan singkat hehe," cetusnya. Ternyata, hal ini mengakibatkan registrasi double.

"Akhirnya, baik saya maupun suami

masing-masing menerima dua amplop kiriman surat suara," tulisnya lagi.

"Pada akhirnya, saya jadi sadar sendiri, betapa banyak pihak yang repot dan capek di balik sampainya kertas suara ini kepada tangan pemilih. Jadi tambahan motivasi bagi saya untuk lebih serius dalam menyalurkan hak dan kewajiban saya di pesta demokrasi kali ini (2014)," tandasnya.

Pengalaman keluarga Ibrahim baru satu kisah bahwa betapa antusiasnya WNI di luar negeri berpartisipasi dalam Pemilu lima tahunan. Ronaldo Sagala lewat akun pribadi twitternya @ronaldosagala punya cerita berbeda. Ini berdasarkan pengalaman kawannya demi menyalurkan hak suara saat Pemilihan Presiden/Wakil Presiden.

"Temen saya pergi *nyoblos* di Brussel Belgia. Padahal untuk sampai di KBRI harus menempuh perjalanan 10 jam PP," kicau Ronaldo. [Wid]



## Catalan; Referendum Bangsa Tanpa Negara

Referendum menjadi jalan baru bagi negara-negara di Eropa yang ingin merdeka dari induknya. Setelah Skotlandia yang gagal merdeka dari Inggris lewat referendum pada pertengahan September lalu, kini Catalan ingin menempuh jalur serupa untuk memisahkan diri dari Spanyol.

DARI banyak catatan sejarah, Catalan adalah salah satu wilayah yang memiliki ekonomi terkaya di Spanyol, meskipun pernah mengalami penderitaan akibat krisis keuangan global tahun 2008-2012. Catalan sendiri dihuni penduduk sekitar 7,5 juta jiwa atau 16 persen dari total penduduk Spanyol.

Catalan diidentifikasi sebagai *nations*

*without state* (bangsa tanpa negara). Hal ini terbukti karena memiliki bahasa dan budayanya sendiri meski negara mereka adalah Spanyol.

Namun, Catalunya merasa terpisah di Spanyol. Keinginan memisahkan diri dari Spanyol sebenarnya sudah terjadi berabad-abad lalu. Akan tetapi semangat pemisahan diri berkobar secara luas saat

kepemimpinan diktator Spanyol, Francisco Franco, pada akhir 1970-an.

Selain menekan identitas Catalan, yang menjadi pemicu nasionalisme Catalan, selain itu karena Franco juga melakukan Pembatasan otonomi yang dilakukan Franco. Konon hal ini pulalah yang menyebabkan FC Barcelona dan Real Madrid, dua klub sepak bola ternama

di Negeri Matador ini, menjadi musuh bebuyutan di rumput hijau.

Presiden Catalan, Artur Mas, mulai menekankan referendum setelah dia gagal mencapai kesepakatan keuangan dengan pemerintah Spanyol pada 2012. Hal ini terkait dengan kekuatan ekonomi setara Denmark dan Portugal, sehingga Catalan telah menjadi mesin ekonomi Spanyol yang seperempat penduduknya menganggur.

Deklarasi referendum disetujui dengan suara bulat oleh parlemen otonomi Catalan pada Januari 2013 lalu, yang memberikan peluang kepada warga Catalan untuk melepaskan diri Spanyol.

Referendum yang digelar pada 9 November mendatang akan menjadi puncak luapan kebebasan warga Catalan. Rencananya, sekitar 1,8 juta penduduk Catalan terlibat dalam jajak pendapat nasional itu. Tujuannya ingin mengetahui sikap warga Catalan apakah mereka tetap menjadi bagian dari kekuasaan Spanyol atau menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan memiliki pemerintahan sendiri.

Disinyalir, tuntutan referendum terjadi karena adanya sejumlah kebijakan pemerintah Spanyol yang dinilai tidak adil terhadap wilayah tersebut. Belakangan mereka menuntut agar pemerintahan Spanyol mengevaluasi ulang kebijakan

pajak barunya dan segera mengucurkan dana talangan.

Mereka menilai wilayahnya yang kaya itu hanya menjadi sapi perah Spanyol yang tengah terbelit utang. Akibat krisis keuangan yang mendera Spanyol, pemerintah Catalan sejauh ini sudah mengeluarkan dana sebesar lebih dari Rp 160 triliun untuk restrukturisasi utang dan menutup defisit anggarannya.

Tuntutan kemerdekaan wilayah yang dikenal dunia sebagai markas tim sepak bola Barcelona ini, juga merupakan puncak masalah dari perilaku tidak adil pemerintah Spanyol. Tindakan Spanyol seperti penerapan pajak yang berlebihan dan isu budaya yang berkaitan dengan penggunaan bahasa lokal Catalan juga menjadi pemicu utama desakan referendum tersebut.

Warga Catalan juga mengeluhkan redistribusi pajak mereka ke bagian lain Spanyol dan meyakini jika daerah mereka akan lebih baik jika dikelola sendiri. Ditambah pula dengan adanya penolakan pemerintah Spanyol terhadap permintaan penambahan kewenangan pajak dan belanja Catalan.

Meski demikian, Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy telah menegaskan ancamannya untuk memblok upaya para pemimpin daerah Catalan yang hendak menggelar referendum. Rajoy menan-

daskan bahwa referendum tersebut ilegal menurut konstitusi Spanyol, yang menyatakan adalah kedaulatan negara harus ditegakkan secara nasional, bukan daerah.

Bahkan, Mahkamah Konstitusi Spanyol telah memutuskan penangguhan rencana referendum kemerdekaan Catalonia pada awal bulan Oktober lalu. Penundaan referendum tersebut secara bulat disetujui oleh 12 hakim. Keputusan ini otomatis menghentikan referendum tersebut.

Rajoy mengatakan tidak satu pun kelompok boleh mengambil keputusan kedaulatan karena dapat mempengaruhi seluruh negeri. Dia juga menyayangkan keputusan Presiden Regional Catalonia, Artur Mas, untuk menggelar referendum.

Meski demikian, pemerintah Catalan mengabaikan larangan itu. Presiden Catalan Artur Mas tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah atas tekanan pemerintah Spanyol. Presiden Catalan Artur Mas menyatakan bahwa mayoritas warga Catalan mendukung rencana referendum itu.

Jika benar-benar merdeka, Catalan kemungkinan besar tetap berada di zona mata uang euro meski tidak memiliki wakil di Bank Sentral Eropa. Dan proses menjadi anggota Uni Eropa pun akan makan waktu lama. [Sof]



## Warga Hongkong Ingin Tetap Pemilu Langsung

Puluhan ribu massa yang tergabung dalam kelompok pro-demokrasi menggelar aksi unjuk rasa di jalan-jalan utama dan sejumlah gedung pemerintahan di Hong Kong sejak akhir September lalu.

RIBUAN demonstran yang sebagian besar berasal dari kalangan mahasiswa itu memblokir jalan dan menyuarakan protes atas campur tangan Tiongkok dalam pemerintahan Hong Kong.

Protes itu menyusul keputusan Beijing untuk melakukan pengujian pada setiap kandidat yang akan berkompetisi pada pemilihan umum pertama Hong Kong

yang akan digelar pada tahun 2017 mendatang.

Pemilihan umum itu sendiri digelar untuk menentukan siapa yang akan menjabat sebagai Kepala Eksekutif yang merupakan jabatan sipil tertinggi di Hong Kong.

Selain memprotes campur tangan Tiongkok,

demonstran juga menuntut agar Kepala Eksekutif Hong Kong saat ini, C.Y. Leung mengundurkan diri dari jabatannya. Ia dinilai terlalu mendukung Beijing dan tidak pro terhadap pembangunan demokrasi di Hong Kong.

Alih-alih memenuhi tuntutan para demonstran, Leung justru menyatakan bahwa dirinya tidak akan mundur dan

## “Pemilihan Kepala Eksekutif Hong Kong akan tetap dijalankan sesuai rencana dan kerangka yang telah ditetapkan NPC pada tahun 2017 mendatang.”

balik menilai demonstrasi itu tidak ber-alasan. Ia menyerukan para demon-stran untuk menghentikan aksinya dan kembali ke rumah masing-masing. Leung berdalih, alasannya menolak mundur adalah karena ia menilai pengunduran dirinya tidak akan menyelesaikan masalah.

Bukan hanya itu, Leung juga menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh para demonstran adalah hal yang sia-sia dan tidak bisa memaksa Beijing mengubah kebijakannya terhadap Hong Kong. Leung juga merujuk pada white paper yang dikeluarkan oleh Komite Tetap-Kongres Rakyat Nasional Tiongkok atau China's National People's Congress (NPS) yang menyebut bahwa warga Hong Kong akan dapat memberikan suara untuk memilih pemimpin pada tahun 2017 mendatang, hanya pada kandidat yang telah disetujui Beijing.

Ia menegaskan beberapa kali dalam sejumlah pernyataan di media sejak awal Oktober bahwa pemilihan Kepala Eksekutif Hong Kong akan tetap dijalankan sesuai rencana dan kerangka yang telah ditetapkan NPC pada tahun 2017 mendatang.

Leung menyebut, pemilihan umum 2017 mendatang adalah kesempatan besar bagi setiap warga Hong Kong, mengingat selama ini jabatan Kepala Eksekutif dipilih oleh 1.200 anggota komite khusus yang ditunjuk.

Aksi unjuk rasa di jalan-jalan utama Hong Kong acap kali diwarnai oleh kekerasan dan berujung dengan keributan antara demonstran dan petugas polisi yang berjaga. Selain gas air mata, polisi juga menggunakan semprotan merica dan pentungan untuk menghalau aksi para demonstran.

Para demonstran pun tak habis akal. Mereka membawa payung demi menghindari diri dari gas air mata atau semprotan merica. Payung kemudian menjadi simbol tersendiri aksi

para demonstran sehingga unjuk rasa tersebut kerap disebut dengan “Revolusi Payung”.

Namun revolusi payung tersebut agaknya berdampak buruk pada perekonomian Hong Kong dan Tiongkok. Kepala ekonom Asia untuk Bank Dunia Sudhir Shetty pada 6 Oktober lalu menyebut bahwa perekonomian Hong Kong dapat terganggu mengingat ulah para demonstran yang memblokir jalan-jalan utama di pusat bisnis pada jam-jam sibuk.



“Dampaknya akan mempengaruhi baik daerah administratif Hong Kong itu sendiri, ekonomi mereka, serta dalam hal dampak yang lebih luas pada perekonomian Tiongkok,” katanya dari Singapura seperti dikutip AsiaOne.

Shetty menyebut, Bank Dunia tidak memiliki perkiraan soal perkembangan ekonomi Hong Kong. Namun ia menuturkan, pihaknya memiliki perkiraan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang dapat turun menjadi 7.4 persen pada tahun ini dan 7.2 persen pada tahun 2015 mendatang. Padahal sebelumnya pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Tiongkok mencapai 7.7 persen.

Shetty menggarisbawahi, Hong Kong merupakan negara yang berpengaruh tinggi bila dibandingkan dengan Taiwan. Dengan aksi unjuk rasa yang berlangsung bisa memberikan pen-

garuh baik jangka pendek atau jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi Hong Kong. Oleh karena itu, dampak ekonomi akan bergantung pada berapa lama ketidakpastian unjuk rasa itu terus berlangsung.

“Ketidakpastian adalah hal yang tidak baik bagi aktivitas ekonomi,” sambung Shetty.

Hong Kong merupakan wilayah bekas koloni Inggris. Sebagai hasil dari negosiasi dan perjanjian 1984 antara Tiongkok dan Inggris, Hong Kong kemudian diserahkan menjadi daerah administratif khusus Tiongkok yang pertama pada 1 Juli 1997. Pada Desember 1999 Makau mengikuti jejak Hong Kong menjadi daerah administratif khusus setelah diserahkan oleh Portugal.

Sejak saat itu, Hong Kong menerapkan prinsip “satu negara, dua sistem” dimana sistem politiknya berbeda dengan Tiongkok. Fungsi peradilan Hong Kong berada di bawah hukum umum. Selain itu dalam dokumen konstitusional yang disusun Tiongkok sebelum serah terima Hong Kong tahun 1997, diatur bahwa Hong Kong akan memiliki tingkat otonomi yang tinggi dalam segala hal kecuali hubungan luar negeri dan pertahanan militer.

Fungsi peradilan independen Hong Kong berada di bawah kerangka hukum umum. Dasar hukum serta dokumen konstitusional Hong Kong pun disusun oleh Tiongkok sebelum serah terima berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam deklarasi bersama.

Konstitusi Hong Kong sendiri menyediakan ruang untuk pengembangan-proses demokrasi. Namun demikian, Beijing memiliki hak veto pada perubahan sistem politik. Selain itu, meskipun memiliki sistem multi-partai, namun setengah wilayah legislatif wilayah itu tidak dipilih langsung, melainkan oleh-kelompok profesional dan perusahaan yang pro Beijing. [Wid]



Rapimnas Evaluasi Pemilu langsung dibuka oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono





Rapimnas Evaluasi Pemilu 2014 di Istana Negara Jakarta bersama Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono



Rapat Koordinasi Dalam Rangka Evaluasi Pelaksanaan Pemilu dihadiri oleh seluruh Pimpinan KPU Kabupaten Kota se-Indonesia wilayah I di Yogyakarta,





Rapat Koordinasi Dalam Rangka Evaluasi Pelaksanaan Pemilu dihadiri oleh seluruh Pimpinan KPU Kabupaten Kota se-Indonesia yang diselenggarakan di Batam, Provinsi Kepulauan Riau.



# KPU dan Pemilu Indonesia

Oleh:  
**Alvan Alvian**  
Dosen Pascasarjana Ilmu Politik  
Universitas Nasional, Jakarta

PEMILU di Indonesia merupakan sebuah fenomena. Ia merepresentasikan kebesaran demokrasi elektoral, di mana dari segi tersebut hanya Amerika Serikat dan India lah yang ada di atasnya.

Ini yang sering dilekatkan pada Indonesia sebagai negara demokratis terbesar ketiga di dunia. Bahkan, kalau bandingannya negara-negara Muslim, Indonesia lah yang terbesar. Republik Rakyat Tiongkok memang paling besar penduduknya, tetapi ia bukan negara yang menerapkan demokrasi elektoral yang kompetitif dan juga bukan negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Indonesia tentu jauh lebih besar dan kompleks, ketimbang, misalnya negeri Muslim-demokratlain, yakni Republik Turki.

Karena itulah wajar, manakala setiap pemilu digelar, apakah pemilu legislatif atau pemilihan presiden (pilpres), banyak publik luar Indonesia yang penasaran: bagaimana pengelolannya?

Tentu dari segi geografis, Indonesia jauh lebih rumit ketimbang Amerika atau India yang sebagian besar wilayahnya daratan. Indonesia adalah negara kepulauan. Ribuan pulau menjadi satu, di bawah administrasi yang berpusat di Jakarta. Pemilu nasional diatur dari Jakarta oleh para komisioner penyelenggara pemilu yang, sejak Pemilu 1999 hingga 2014, semakin diisi oleh orang-orang yang profesional. Tidak mudah menyiapkan penyelenggaraan pemilu.

Tetapi, para komisioner penyelenggara pemilu, sudah punya pengalaman dan contoh model sejak 1999—kendatipun, satu pemilu ke pemilu lain, sistemnya berlainan, dari yang sederhana ke yang lebih rumit.

Pemilu legislatif 2014 adalah pemilu



DPT, sebanyak 134 juta menggunakan hak pilihnya. Tingginya angka partisipasi ini menunjukkan bahwa pemilu di Indonesia merupakan pemilu besar dan tidak main-main.

Dalam kasus penyelenggaraan pemilu di Indonesia, KPU sering dihadapkan pada situasi dilematis. Di satu sisi, KPU menunggu aturan hukum dari DPR yang belum juga diselesaikan, padahal jarak waktu ke penyelenggaraan pemilu sudah semakin sempit. Di sisi lain, KPU juga dituntut untuk bekerja profesional agar pemilu bisa berjalan dengan baik. Di sisi yang lain lagi, KPU sering mendapat komplain dari berbagai pemangku kepentingan, dari partai politik, para caleg hingga aktivis lembaga swadaya masyarakat dan yang lain, terkait dengan hal-hal tertentu.

yang paling rumit sepanjang sejarah. Pemilu 2014 menerapkan sistem proporsional terbuka murni dengan basis dukungan suara terbanyak. Kita semua tahu bahwa, memang partai politik peserta pemilu lah yang menyodorkan nama-nama calon anggota legislatif (caleg) untuk dipilih oleh peserta pemilu. Tetapi, begitu caleg dilepas dalam kontestasi pemilu terbuka, maka mereka akan saling berjuang sendiri untuk meraup sebanyak mungkin dukungan suara.

Persaingannya berpola antar caleg baik dari dalam maupun luar partai masing-masing. Terlepas dari berbagai eksekusi yang menjadi kritik, yakni terjadinya praktik pragmatisme-transaksional yang meluas dalam masyarakat, secara teknis pemilu kita menjadi bertele-tele perhitungannya.

Pemilu di Indonesia, betapapun diwarnai isu antipartai, angka partisipasinya dalam pemilu masih cukup tinggi. Pemilu legislatif yang diselenggarakan pada 9 April 2014, misalnya, dari jumlah Daftar Pemilih Tetap sekitar 187 juta, yang menggunakan hak pilih sekitar 140 juta orang. Untuk Pilpres 2014, angka partisipasinya bahkan yang tertinggi di dunia. Dari 190 juta pemilih yang terdata dalam

KPU dituntut bekerja "perfect", justru di tengah-tengah keterbatasan yang ada. Karenanya, KPU ibarat kue bika, dari atas dipantau terus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan juga memperoleh tekanan dari lembaga-lembaga politik; dan dari bawah dituntut oleh mereka yang punya hak pilih untuk bisa bekerja optimal. Jadi atas kena, bawah kena, dan sebagai kue bika pun KPU tidak boleh gosong. Karenanya, setiap usai pemilu yang berhasil digelar secara damai dan mampu mengantarkan ke transisi kepolitikan baru di ranah legislatif dan pemerintahan, KPU layak diberikan apresiasi sedemikian rupa.

## Sistem Pemilu

Secara teknis, praktik sistem pemilu yang diterapkan pada 2014 adalah ekstrim lain dari yang dipakai pada 1999, pemilu pertama Era Reformasi itu. Konon, sistem Pemilu 1999 masih sama dengan pemilu-pemilu semasa Orde Baru, yakni dengan menerapkan sistem proporsional dengan daftar



stelsel tertutup berdasarkan nomor urut.

Sistem ini jauh lebih sederhana, karena yang dicoblos oleh pemilih ialah tanda gambar partai, bukan nama caleg yang jumlahnya demikian banyak itu. Setiap sistem pemilu memang ada lebih dan kurangnya. Proporsional tertutup memposisikan para caleg lemah otonominya. Peluang keterpilihannya, sangat besar ditentukan oleh partai. Proporsional terbuka, sebaliknya: otonomi partai rendahketimbang para caleg dalam urusan pemenangan.

Tapi, sistem pemilu kita yang terakhir itu, anomali dengan yang pertama. Pasca-pemilu, partai ternyata jauh lebih otonom ketimbang anggota legislatif. Partai, secara aturan, bisa mengganti antar waktu alias mencopot anggota legislatif partainya,

### “Yang tidak boleh dilupakan, perubahan sistem pemilu dan praktiknya, hendaknya jangan membukakan peluang bagi disintegrasi bangsa. Ini yang penting.”

dengan alasan apapun. Padahal, pada 1999 hal demikian tidak terdapat.

Sehingga, kita masih ingat bahwa ada beberapa anggota DPR hasil Pemilu 1999 yang berkonflik dengan partainya, tetapi tidak dapat dicopot, dan lantas muncul fenomena anggota nonfraksi. Atau ada juga yang pindah ke fraksi lain. Sekarang ini, otonomi anggota dewan tetap berada di bawah bayang-bayang partainya. Ini soal lain, dan tidak berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.

Tapi, saya hendak mengatakan bahwa efektivitas penyelenggaraan pemilu memang sangat ditentukan oleh pilihan sistemnya. Makanya, saya bisa memahami, maanakala Ketua KPU Husni Kamil Manik mengusulkan agar pemilu legislatif 2019 menerapkan kembali sistem pemilu proporsional tertutup.

Sistem tersebut, katanya, bisa membuat penyelenggaraan pemilu lebih murah dan cepat saat menyampaikansambutan pada pembukaan rapat pimpinan KPU terkait evaluasi dan laporan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2014 di Istana Negara (Media Indonesia, 15 Oktober 2014).

Tentu saja usul KPU itu sekedar usul, karena yang menentukan tetap para wakilrakyat. Kalau mereka menimbang-nimbang ulang bahwa sistem pemilu 2014 harus diubah, maka perubahan sistem pemilu akan dilakukan. Berubah-ubahnya sistem pemilu, sesungguhnya merupakan hal yang lazim, dan ini merupakan domain pemerintah dan legislatif. KPU pun berhak menyuarakan hasil evaluasinya untuk kebaikan-kebaikan penyelenggaraan pemilu ke depan.

#### Kualitas Pemilu

Fenomena DKPP sangat penting dalam konteks penyelenggaraan pemilu dewasa ini. Lembaga ini mencermati permasalahan-permasalahan etis para anggota KPU dari tingkat pusat dan daerah, bahkan bisa berujung pada pemecatan.

Makna dari fenomena DKPP sesungguhnya adalah bagaimana penye-

lenggara pemilu mampu menjaga integritasnya sedemikian rupa, di tengah-tengah banyaknya godaan-transaksional pemilu. Integritas inilah yang perlu secara proaktif ditunjukkan oleh para anggota KPU pusat dan daerah. Lagi-lagi, ini juga karena sistemnya masih membuka celah, kendatipun sempit celah itu, bagi oknum untuk melakukan manipulasi atau jual-beli suara.

Indonesianis Jeffrey Winters pernah mengulas bahwa, salah satu keterbatasan sistem pemilu kita adalah adanya demikian banyak celah yang bisa dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk memanipulasi suara, sehingga tidak ada jaminan sepenuhnya bahwa jumlah suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan sama dengan perhitungan akhirnya (tidak bertambah atau berkurang).

Meskipun teknologi informasi telah dimanfaatkan, tetapi pada praktiknya, tetap saja masih ada celah bagi kejahatan pemilu. Sehingga, belakangan ini wacana e-voting atau e-elections alias pemungutan suara yang dilakukan secara digital dalam pemilu terus mengemuka. Sayangnya, pemilu elek-

tronik yang memanfaatkan perangkat canggih teknologi informasi itu, memang masih sebatas wacana.

Belum ada aksi nyata ke arah pembangunan infrastruktur yang memadai dan aman untuk berpemilu secara elektronik. Kebutuhan untuk menyelenggarakan pemungutan suara dalam pemilu secara murah, efektif, aman dan benar-benar demokratis, memang semakin terasa mendesak.

Demikian pun ikhwal proses penyelesaian sengketa pemilu, dan jangan lupa efektivitas pengawasan pemilu oleh Lembaga Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal-ikhwal pelanggaran pemilu, seiring dengan ekspose media massa, terasa semakin demonstratif.

Namun demikian, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan proses penanganannya secara hukum, seringkali hanya sekadarnya. Para pelanggaran seolah tidak takut melanggar, karena hukumannya tidak menimbulkan efek jera.

Ikhtiar ke arah kualitas pemilu perlu terus dilakukan. Kata kuncinya adalah evaluasi dan perbaikan. KPU sendiri tentu telah melakukan evaluasi atas penyelenggaraan pemilu legislatif dan Pilpres 2014. DKPP dan Bawaslu juga tentunya ikut berkontribusi dalam proses evaluasi itu, juga dari berbagai pemangku kepentingan.

Saya setuju atas rekomendasi perbaikan sistem pemilu kita ke depan, terutama agar terhindar dari eksek-eksek yang tidak baik. Perbaikan sistem juga dimaksudkan untuk menutup celah kelemahan yang ada, kendatipun kita akan segera menyadari bahwa hal itu tidak mudah dilakukan.

Konstelasi politik dan kecenderungan elite politik di pemerintahan dan, terutama parlemen, akan bergerak dinamis.

Hanya saja kita tidak tahu apakah, muara dari interaksi dinamis mereka akan membuahkan kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada ikhtiar pencarian sistem pemilu yang lebih cocok, atau sebaliknya. Yang tidak boleh dilupakan, perubahan sistem pemilu dan praktiknya, hendaknya jangan membukakan peluang bagi disintegrasi bangsa. Ini yang penting. [Sof]

## DIK DOANK: Kinerja KPU Sudah Oke!



MUSISI Kawakan Dik Doank menilai antusiasme masyarakat dalam gelaran pesta demokrasi tahun ini sangat tinggi bila dibanding dengan pemilu sebelum-sebelumnya.

“Aku lihat pemilu kemarin banyak orang yang antusias sekali. Di dekat rumahku, aku lihat ada orang kaya yang walaupun lumpuh rela pakai kursi roda datang ke TPS dan terus dibopong ketika mau nusuk surat suara. Aku jarang lihat yang seperti ini,” ujarnya ketika ditemui di Kandank Jurang Doank yang terletak di kawasan Jurangmangu, Ciputat, Tangerang Selatan.

Ia menilai, salah satu pendongkrak antusiasme itu adalah kompetisi ketat yang terjadi pada pemilu presiden Juli lalu.

“Karena dua tokoh yang dipilih ini sangat kuat figurnya ya, jadi dua orang ini pasti menjadi pilihan banyak orang dengan dua karakter yang berbeda,” sambung penyanyi yang pertama kali menembus dapur rekaman pada

presiden kemarin memiliki karakternya masing-masing.

Kata Dik Doank, salah satu kandidat cenderung lebih maskulin, sedangkan kandidat lainnya juga maskulin tapi juga memiliki karakterfeminim secara bersamaan.

“Dan akhirnya yang terpilih justru adalah unsur yang bisa maskulin dan feminim. Yang menjadi pemimpin nanti juga harus merakyat, mau melayani,” kata penyanyi yang juga dikenal sebagai pembuat desain cover album tersebut.

“Aku ternyata benar, kalau dia turun ada ribut-ribut seketika damai. Namanya juga wali Allah,” tuturnya.

Sementara itu terkait penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan, Dik Doank menilai KPU cukup berhasil. Ia justru menyayangkan keberpihakan media yang kental terlihat dalam pemilu kemarin. Menurutnya, media merupakan sarana tambahan informasi yang seharusnya tidak membodoh-bodohi masyarakat.

“Aku rasa sih kinerja KPU nya sudah oke. Cuma paling yang di pelosok-pelosok seperti Papua itu kan ada beberapa kasus, aku rasa KPU lebih tahu apa yang harus dilakukan,” tandasnya.

tahun 1997 lalu dengan single berjudul ‘Pulang’ itu.

“Kita sampai di kamar, suami istri bisa sampai bersebrangan karena dua pilihan yang beda itu. Dan itu terjadi di sejumlah keluarga,” sambungnya. Dik Doank mengaku, pada pemilu 2014 lalu, ia merupakan pendukung salah satu kandidat.

“Aku cukup tahu kalau dia walinya Allah,” jelas Dik Doank sambil menambahkan bahwa dua kandidat yang berkompetisi dalam pemilu

### “Aku lihat pemilu kemarin banyak orang yang antusias sekali. Di dekat rumahku, aku lihat ada orang kaya yang walaupun lumpuh rela pakai kursi roda datang ke TPS,”

## SULIS: Jangan Ada Lagi Kampanye Hitam



SEBAGAI selebritas muda, Sulistyowati atau yang akrab disapa Sulis, partisipasi dari kalangan generasi muda sangat jelas terlihat dalam pemilu 2014 kemarin dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Pelantun lagu-lagu religi ini merasa generasi muda sekarang lebih pro aktif membuat gerakan-gerakan. Menurutnya, kalau dulu tidak terlalu terasa karena lebih apatis, tidak seperti sekarang.

Sulis melihat adanya semangat dan harapan baru dari generasi muda yang mungkin karena munculnya tokoh-tokoh muda yang memberikan harapan. Oleh karenanya, hal ini wajar terjadi jika anak-anak muda ikut tergerak berpartisipasi dan peduli dalam persoalan politik.

Penyanyi yang sering berduet dengan Haddad Alwi ini menilai bahwa pendidikan politik harus ditanamkan di bangku sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi sehingga sadar politik tumbuh sejak dini.

Sulis menekankan, khususnya kepada kaum Muslim, agar bisa menerima perbedaan dan harus bisa mencintai

semua orang yang ada di negeri ini.

"Jangan sampai jika kita memiliki pemimpin yang berbeda keyakinan membuat kita tidak patuh. Yang terpenting lihatlah bagaimana cara ia memimpin, jangan lihat agamanya. Yang harus ditolak adalah segala hal yang berdampak pada runtuhnya NKRI," demikian Sulis menekankan.

Penyanyi yang terkenal lewat lagunya yang berjudul Ummi ini menekankan kalau memang mau tinggal di Indonesia maka harus menghargai perbedaan. Ia juga mengharapkan kedepannya tidak adalagi isu-isu SARA seperti yang terjadi kemarin-kemarin.

"Saya berharap ke depan sudah tidak ada lagi black campaign. Kalau kita ingin positif tapi dengan menjunjung tinggi negativitas seseorang, maka perlu dipertanyakan lagi sisi positif orang tersebut," ujarnya.

Sulis membandingkan jika melihat di luar negeri, mereka bersaing secara sehat dan cerdas tidak seperti yang terjadi di Indonesia dimana antar kelompok masih bersikap anarkis.

"Saya berharap orang-orang Indonesia memiliki kesadaran. Kita memang banyak berbeda, tapi dengan perbedaan Indonesia bisa menjadi kaya. Kita harus lebih cinta kepada negeri kita," katanya.

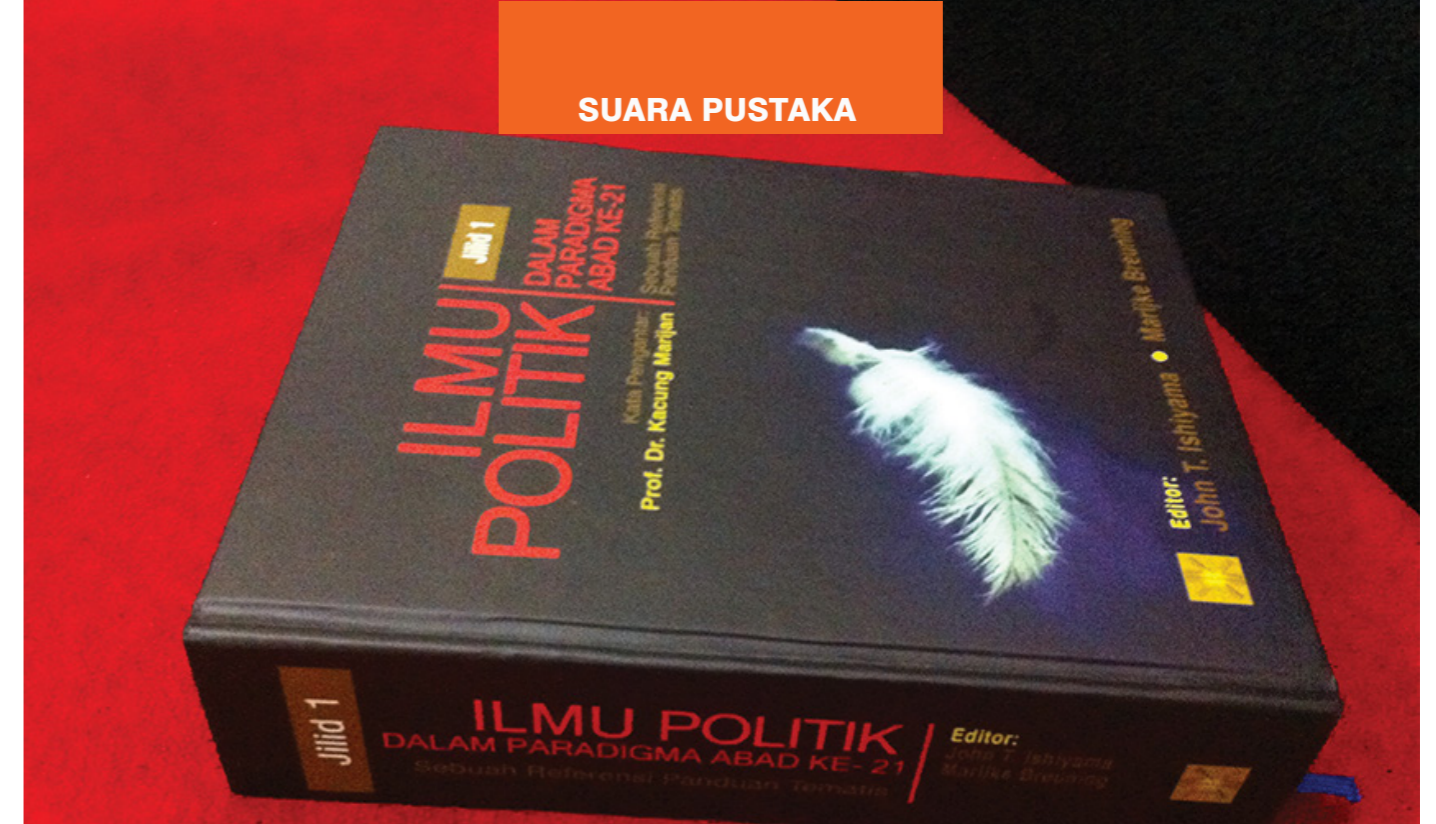
Melihat fenomena gugatan sengketa dalam pilpres, Sulis melihat selama ini yang terjadi memang yang kalah selalu menggugat, baik beda tipis ataupun kalah jauh.

"Mungkin karena rasa ingin berkuasa, yang mana kalau belum berjuang sampai titik puncak sampai dimana usaha maksimal itu dilakukan. Dimaklumi saja. Tapi juga perlu juga adanya oposisi untuk jadi penyeimbang," tambahnya.

Menurutnya, kalau kita menaruh kepercayaan kepada KPU pasti tidak akan menggugat. Kalau saya pasti berfikir positif kepada lembaga pemerintah, entah KPU maupun KPK misalnya. Kalau misalnya mau curang, terlalu banyak orang yang harus dilibatkan sehingga terlalu riskan. Tapi wallahualam, saya sih selalu berfikir positif mengenai KPU.

"Kalau mengutip pernyataan Pak Anis Baswedan, demokrasi yang terjadi di Indonesia ini ibarat kran air yang terlalu dibuka hingga dol. Jadi kitanya belum siap berdemokrasi tapi demokrasi yang ada sudah terlalu kuat sehingga amburadul. Saya berharap demokrasi di Indonesia harus dijunjung tinggi dan juga berharap ada pemimpin-pemimpin bangsa yang teladan yang mengawal demokrasi itu," lanjutnya.

Menurutnya, sistemnya dibuat bagaimanapun tetap tergantung-pelaksananya. Sistemnya mau dibuat bagaimana saja kalau memang pada dasarnya manusianya rusak, ya akan tetap rusak. Jadi bagaimanapun sistem yang dibuat harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan berpihak kepada rakyat. **[Sof]**



## Pintu Gerbang Ilmu Politik

ILMU politik merupakan salah satu ilmu yang cukup tua. Ilmu politik, secara teoritik dan praktik, lahir dan berkembang seiring dengan kehidupan manusia itu sendiri. Sebagai sebuah kajian, ilmu politik pun tak lepas dari ragam kritik.

Kini, di Abad 21, cakupan ilmu politik semakin kompleks. Politik juga tidak lagi dipahami sebagai persoalan yang terjadi di lembaga-lebaga pemerintah, namun juga sampai mencakup kultur-sosial dan bahkan perilaku personal. Maka yang terjadi studi, ilmu politik pun menjadi kebutuhan, bukan semata akademisi maupun pelaku politik, melainkan warga negara lain yang mau tak mau berhubungan dengan politik.

Untuk tahu dan memahami studi ilmu politik abad ke-21, tentu saja dibutuhkan sumber referensi yang bisa menjadi inti rujukan untuk memahami ide-ide utama, konsep, dan kerangka yang melandasi studi politik dalam ukuran abad kekinian. Selain itu, referensi itu juga harus menunjukkan bagaimana pertemuan disiplin politik dengan disiplin lainnya.

Buku "Ilmu Politik; Dalam Paradigma

Abad 21" bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Buku ini, yang diterjemahkan dari buku "21st Century Political Science; A Reference Handbook, selain memiliki kompleksitas bahasan dengan cukup komprehensif, juga mudah dipahami oleh siapa pun. Bahkan, buku ini juga bisa dibaca oleh pemula yang mau atau baru saja memasuki gerbang studi ilmu politik.

Dua editor buku ini, John T. Ishiyama dan Marjike Breuning, cukup menjadi jaminan betapa buku ini perlu untuk dibaca bagi siapapun yang mauterlibat dalam ilmu politik.

John T. Ishiyama merupakan profesor ilmu politik di University of North Texas. Ia juga merupakan *editor in chief* *Journal of Political Science Education*, anggota American Political Science Association, anggota Dewan Eksekutif Midwest Political Science Association, serta anggota Masyarakat Ilmu Politik Nasional.

Marjike Breuning juga profesor ilmu politik di University of North Texas, yang meraih gelar doktor dari Ohio State University. Ia merupakan anggota International Studies Association, anggota American Political Science Association, anggota International Society of Political Psychology, serta

European Union Studies Association. Marjike Breuning juga bagian dari tim editorial awal Foreign Policy Analysis ISA.

Dalam buku ini, John T. Ishiyama dan Marjike Breuning berusaha menyajikan karya bernuansa ensiklopedis yang otoritatif dan memuat esensi-esensi dari berbagai macam pendekatan (baik teoritis maupun metodologis) dan perdebatan penting dalam bidang ilmu politik.

Fokus pada esensi ini lebih berarti bahwa karya ini mencakup banyak area dalam disiplin politik-yang jarang dibahas dalam buku-buku teks seperti: Metodologi Penelitian Politik atau Pemikiran Politik Islam atau Pemikiran Politik yang berlatar budaya Asia-sehingga pembaca dapat memahami dan menguasai pemikiran politik yang dibutuhkan untuk mengkaji lebih lanjut teori dan metodologi politik abad ke-21.

Oleh karena itu, buku yang diterbitkan di Indonesia oleh Penerbit Kencana ini merupakan panduan definitif untuk memahami konteks, teori, dan metodologi serta status perkembangan terkini dalam ilmu politik kontemporer. \*\*\*

# Lima Kebiasaan Sehat Menangkal Penyakit Mematikan



HIDUP SEHAT merupakan hal yang harus menjadi prioritas terpenting dalam hidup seseorang. Aktivitas atau pekerjaan akan berjalan lancar jika kondisi tubuh dalam keadaan sehat atau dalam keadaan prima.

Namun berbagai penyakit yang menyerang tubuh tentunya sangat membahayakan tubuh itu sendiri. Untuk itulah, kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan tubuh pada segala kondisi maupun cuaca ekstrem serta berbagai penyakit yang berbahaya. Berbagai kebiasaan sehat dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi semua hal diatas.

Lalu, apa saja kebiasaan sehat untuk menangkai berbagai penyakit mematikan tersebut?

*Pertama, rutin mengkonsumsi buah-buahan.*

Aneka buah-buahan merupakan sumber antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh. Fungsi antioksidan tersebut akan membantu menangkai berbagai penyakit seperti kanker dan berper-

an meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

*Kedua, rutin mengkonsumsi aneka makanan laut.*

Makanan laut yang dimaksud yaitu ikan tuna, salmon serta sarden. Aneka makanan laut tersebut merupakan sumber utama omega 3. Fungsi omega 3 yaitu sangat berperan menangkai penyakit jantung.

Ketiga, rutin minum teh hijau. Teh hijau merupakan salah satu minuman yang merupakan sumber utama antioksidan. Fungsi antioksidan yang terkandung dalam teh hijau sangat berperan menghambat pertumbuhan sel-sel kanker.

*Keempat, selalu aktif setiap hari.*

Dalam hal ini, usahakan untuk rutin berolahraga teratur setiap pagi serta usahakan selalu menggerakkan anggota tubuh bagi anda yang harus bekerja berlama-lama dengan posisi duduk. Karena terlalu lama mendiamkan anggota tubuh akan

berpotensi besar terserang berbagai penyakit seperti jantung, diabetes serta penyakit berbahaya lainnya.

*Kelima, rajin untuk menyikat dan flossing Gigi.*

Sisa makanan yang mengendap di sela-sela gigi merupakan tempat yang nyaman bagi bakteri untuk berkembang biak. Berbagai bakteri tersebut berpotensi masuk ke tubuh melalui aliran darah yang dapat membahayakan kesehatan tubuh anda tersebut.

Selain ke lima hal tersebut, kebiasaan sehat lainnya juga sangat baik untuk dilakukan demi menghalau berbagai jenis penyakit, adalah:

*Tidur cukup setiap harinya.* Malam merupakan waktu yang tepat untuk mengistirahatkan tubuh dan pikiran. Tidurlah selama kurang lebih 8 jam setiap malamnya dan hindari bergadang hingga larut malam.

*Minum air yang cukup.* Usahakan untuk mencukupi kebutuhan cairan yang diperlukan oleh tubuh, khususnya air putih, Minumlah air putih kurang lebih 8 gelas perharinya untuk membuang berbagai racun pada tubuh.

Jangan lupa berdoa. Sehat itu milik Allah SWT maka kita diharuskan untuk selalu berdoa/meminta kepada-Nya dengan cara shalat. Dengan shalat kita juga bergerak seperti olah raga. Gerakan shalat juga bisa membuat tubuh kita makin sehat. Jadi jangan pernah meninggalkan shalat dan juga berdoa.

Itulah beberapa hal atau cara menjaga kesehatan badan dan tubuh yang baik, semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda. Menjaga kesehatan itu lebih murah daripada berobat saat sudah sakit. Untuk itu, sangatlah penting menjaga kesehatan tubuh Anda. \*\*\*

# Mobil-Mobil Bapak Presiden



SEBAGAI orang nomor satu di negara, kendaraan dinas yang digunakan tentunya dilengkapi keamanan super serta nyaman demi menunjang tugas-tugas kenegaraan.

Mercedes-Benz telah berpuluh-puluh tahun menjadi mobil dinas Presiden Republik Indonesia, terkecuali Presiden Soekarno dulu yang mobil dinas-nya masih beragam dari Buick 8 sampai Lincoln Cosmopolitan.

Paling menarik perhatian mobil dinas Presiden Soeharto dulu. Sebagai generasi yang tumbuh di era 90's, pasti ingat betul seluk-beluk Presiden kontroversial ini. Presiden Soeharto di awal tahun 90-an menggunakan mobil dinas Mercedes-Benz limousine warna hitam. Itulah Mercedes-Benz 500SEL limousine keluaran tahun 1987.

Body mobil Kepresidenan RI di era Soeharto ini dilengkapi dengan kaca anti peluru setebal tiga inci, kurang dua inci dari Cadillac One yang digunakan Presiden Barack Obama saat ini dengan ketebalan lima inci. Beberapa sensor juga menempel pada mobil ini agar menjamin keselamatan Presiden Soeharto ketika berdin. Mobil ini juga dilapisi baja dan platina hitam yang tahan terhadap serangan peluru, mortar, dan guncangan. Tidak heran jika melihat mobil ini melintas, siapapun sosok negarawan yang ada di dalamnya akan tampak begitu gagah

dan makin 'terlihat' disegani. hun 1994 yang dibuat dari baja anti peluru. Mobil ini dulu juga dipakai oleh Presiden Soeharto. Namun sejak tahun 2009, Presiden SBY telah beralih menggunakan mobil Mercedes-Benz model W221 keluaran tahun 2008.

Untuk keamanan, Mercedes-Benz ini tahan terhadap fragmen yang muncul dari granat tangan, serta bahan peledak lainnya. Mobil dinas Kepresidenan ini tetap memiliki ketangguhan tersendiri dan cukup memenuhi kriteria sebagai kendaraan pemimpin negara.

dan makin 'terlihat' disegani.

Sejak tahun 1994, Mercedes-Benz 500SEL limousine 1987 ini mulai jarang terlihat saat Presiden Soeharto hendak bekerja. Posisinya digantikan oleh Mercedes-Benz S600 produksi tahun 1994 dengan spesifikasi pengamanan, agak lebih rendah dari sebelumnya walaupun usianya lebih muda. Tahun 1998, Mercedes-Benz 500SEL 1987 ini dibawa ke Museum Mercedes-Benz di Stuttgart, Jerman, untuk sebuah pameran mobil-mobil Presiden legendaris di dunia. Mobil itu dibawa atas restu Presiden B. J. Habibie yang naik tahta menggantikan Presiden Soeharto.

Di periode awal kepemimpinannya, Presiden SBY menggunakan mobil Mercedes-Benz S600 keluaran ta-

Untuk mobil yang ditumpangi Presiden RI ketujuh, Joko Widodo alias Jokowi, diklaim berlapis baja dengan tingkat resistensi Eropa B6/B7, yang dapat menahan tiga tembakan senapan militer M60, M14, atau FAL-FN, serta tembakan senjata kecil seperti M16, dan 357 Magnum. Selain itu, juga memberikan perlindungan terhadap fragmen yang muncul dari ledakan. Adopsi perlindungan ini menggunakan VR9.

Seluruh kaca mobil ini dilapisi lapisan polikarbonat agar tidak pecah dan dapat melukai penumpang. Untuk fitur keamanan termasuk ban run-flat Michelin PAX245-700 R470 AC, yang mampu membuat mobil tetap bisa berjalan sejauh 60 kilometer tanpa udara. \*\*\*





Create a blog. It's free.

Get started



Beautiful, customizable templates and layouts. [Try the template designer](#)



Up to the minute stats



Make money with AdSense



Explore [Blogs of Note](#)

Want to learn more? Take a [quick tour](#), watch a [video tutorial](#) or read [Blogger Buzz](#).

Sign in with your  
Google Account

Email:  
ex: pat@example.com

Password:

Stay signed in

Sign in

[Can't access your account?](#)

Don't have a Google Account?  
[Get started](#)

## Mengapa KPU Daerah Tak Punya Situs Resmi?

KPU Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung ternyata menggunakan layanan gratis dari Google yaitu Blogger.com/Blogspot.com. Kenapa alamat blog KPU tersebut menarik bagi saya? Sebelum saya jawab pertanyaan tersebut akan saya beri gambaran singkat apa itu Blogger.com.

Blogger.com adalah salah satu layanan Gratis dari Google untuk kebutuhan berbagi informasi berupa teks, gambar dan video. Informasi tersebut dirangkum dalam sebuah halaman yang biasa disebut dengan WebBlog atau disingkat dengan Blog, setiap Blog memiliki alamat unik yang tidak mungkin sama. Bila anda menggunakan layanan gratis dari Google maka anda akan mendapat alamat blog dengan akhiran blogspot.com.

Jadi apabila anda menjumpai blog dengan akhiran blogspot.com maka

dapat dipastikan blog tersebut menggunakan layanan gratis dari Google. Untuk mendapatkan layanan gratis tersebut persyaratannya hanya ada satu yaitu anda cukup punya email saja, anda bisa kunjungi Blogger.com untuk mendapatkan layanan blog gratis tersebut.

Kembali ke pertanyaan saya diawal, kenapa saya tertarik dengan alamat blog KPU Kabupaten Tanggamus? Sebagai orang yang sedikit paham tentang seluk beluk dunia internet tentu saya sangat heran bila ada suatu instansi pemerintahan menggunakan blog resminya menggunakan blogspot.

Dengan menggunakan layanan Blogger.com, informasi yang disampaikan oleh KPU Tanggamus bisa dimanipulasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan membuat alamat blog yang hampir sama.

Menurut saya ini sangat membingungkan masyarakat karena masyarakat tidak tahu mana blog resmi dari KPU dan mana blog palsu KPU. Blog yang menggunakan layanan Blogger.com adalah milik Google, artinya Google bisa menghapus blog tersebut kapanpun tanpa pemberitahuan kepada kita! Kalau blog tersebut adalah blog pribadi mungkin kita hanya bisa ngomel ngomel saja bila dihapus oleh Google, tapi bagaimana kalau blog tersebut adalah sebuah blog suatu instansi yang informasinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas? Apa tidak masyarakat yang dirugikan? Apakah KPU Tanggamus tidak memiliki dana untuk membuat website atau blog berbayar yang harganya tidak sampai 1 juta per tahun?

**Dar Edi Yoga**  
Pemerhati sosial-politik, tinggal di Bekasi

# SAYA GOLPUT ADA MASALAH?

## Menjadikan Rakyat Sebagai Pemenang

Golput teknis ini, tidak menyangkut satu dua orang. Mungkin ratusan, ribuan, bahkan ratusan ribu orang.

SAYA mengapresiasi pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan presiden yang berjalan dengan lancar. Meskipun memang di beberapa tempat ada satu dua hal yang tidak diinginkan terjadi, namun itu semua bisa ditangani dengan cukup baik oleh penyelenggara pemilu maupun oleh aparat penegak hukum.

Hal yang perlu diperbaiki ke depan, adalah terkait dengan sosialisasi atau cara lain yang bisa memudahkan warga untuk ikut memilih. Terutama bagi warga yang baru pindah tempat tinggal, dengan kartu tanpa penduduk(KTP) lama. Mereka menjadi males ikut datang ke tempat pemungutan suara (TPS) karena harus melapor dulu ke kelurahan.

Sedangkan melapor ke kelurahan, bagi kebanyakan warga yang



baru pindah, dan belum terlalu lama tinggal di daerah itu, bukan lah sesuatu yang "menyenangkan". Akhirnya mereka menjadi golongan putih (golput). Bukan golput karena menolak pemilu atau golput ideologis, melainkan golput karena persoalan teknis.

Saya kira, golput teknis ini, tidak menyangkut satu dua orang. Mungkin ratusan, ribuan, bahkan ratusan ribu orang. Di tempat lain, sebagaimana banyak diberitakan, ada juga golput karena TPS jauh, sehingga ketika datang, TPS sudah ditutup.

Bila tidak ada jalan keluar, saya menilai persoalan golput teknis ini akan semakin membengkak. Mungkin saja, citra dan proses demokrasi di Indonesia akan sedikit terganggu oleh golput jenis ini. Karena itu harus ada solusinya, yang lebih tepat dan bijak.

Tapi sekali lagi, secara umum, saya menilai pemilu dan pilpres ini cukup sukses. Tapi, saya juga menilai, tugas penyelenggara pemilu belum usai. Masih banyak hal lain yang harus dilakukan. Setelah pemilu dan pilpres, saya kira, penyelenggara pemilu juga, sebagai wasit, bertugas untuk mendamaikan kembali suasana agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga.

Saran saya kepada KPU, evaluasi pemilu juga tidak dilakukan secara formalitas belaka. Dalam artian, harus ada rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan, baik dalam tataran konseptual, kebijakan, maupun teknis di lapangan. Sehingga ke depan, pemilu semakin meriah, partisipasi publik semakin tinggi, dan tetap berjalan dengan aman dan nyaman.

Kita ingin rakyat lah yang menjadi pemenang dalam setiap proses demokratisasi di Republik ini. Sebab bukankah demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat?

**Ummi Raushan, SS.**  
Komplek Puri Arsana Sawangan, Bojong Sari, Depok, Jawa Barat. Pernah menjadi anggota KPPS

# Merawat Partisipasi Warga

Oleh:

**Robby Leo Agust S.Si**

Kepala Bagian Publikasi dan Sosialisasi  
Informasi Pemilu Biro Teknis dan Hupmas KPU RI

KULTUR POLITIK di era modern berbeda dengan kultur politik parokial di masa lalu. Dalam kultur politik parokial, sikap politik warga sangat tergantung pada perilaku kharismatik elit.

Dalam kultur politik modern, sebagaimana dicatat oleh Almond dan Verba, dalam *The Civic Culture; Political Attitudes and Democracy in Five Nations*, warga negara mandiri dalam mengekspresikan diri mereka dalam persoalan politik. Di saat yang sama, negara juga menjamin setiap warga negara punya hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik.

Almond dan Verba juga mencatat, semakin modern, kultur partisipasi ini semakin menguat dan hampir mustahil bagi elit politik untuk mengabaikan kebutuhan akan partisipasi yang lebih terbuka lagi.

Namun demikian, Almond dan Verba juga punya sedikit kekhawatiran dengan kultur politik semacam ini. Bila warga negara mengekspresikan aspirasi politik dengan terlampau intensif, di saat yang sama ada dorongan untuk menolak dan mengganggu semua hal yang tidak mengakomodir kepentingannya dalam ruang-ruang demokratis.

Dalam kadar tertentu, Indonesia patut bersyukur. Boleh dikatakan, kultur politik yang ideal menurut Almond dan Verba ini sudah merambat dalam alam bawah sadar warga negara. Semangat demokrasi yang semakin terkonsolidasi sejak Reformasi bergulir, terus merasuk menjadi kesadaran baru akan proses politik yang mau tak mau harus melibatkan diri.

Indikator dari kesadaran ini terlihat



jelas dari partisipasi publik dalam proses demokrasi yang semakin meriah. Kini, momentum politik bukan hanya menjadi milik pelaku politik dalam artian formal belaka. Kini, politik menjadi kebutuhan setiap orang, yang memang pada dasarnya, sebagaimana mantra filosof Yunani masa lalu, manusia adalah makhluk politik dan tak bisa lepas dari politik ketika ia harus berhubungan dengan yang lain.

Tentu saja, di saat yang sama, kekhawatiran Almond dan Verba juga sepertinya harus diantisipasi sejak awal. Di tengah sosial media yang menjadi medium menyampaikan pandangan dengan bebas, politik bisa anti-klimaks.

Politik bisa dianggap sebagai cara yang absah untuk menfitnah dan menuding tanpa dasar. Politik juga bisa menjadi arena untuk merusak identitas dan entitas warga lain secara lebih terbuka.

Tentu saja ini membahayakan demokrasi itu sendiri. Dengan bahasa yang lebih rigid, ini bentuk partisipasi yang tidak bertanggungjawab. Bila tak segera dicarikan jalannya, maka anarkisme ini—dari mulai anarkisme verbal hingga anarkisme fisik—akan menjadi hal yang lumrah, dan tentu saja merusak “ruh dasar” berbangsa, yaitu kebersamaan atau gotong royong.

Dalam kondisi seperti ini, mungkin tepat tawaran dari peneliti University of Leuven, March Hooge, bahwa proses politik juga butuh kecakapan dari elit dan perlu kepercayaan dari publik.

Dalam tataran praktis, kecakapan politik (*political efficacy*), berarti semuapelaku politik mempunyai perasaan bahwa pandangannya cukup berarti, dan karena itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ia juga harus berkeyakinan bahwa pijakan dasar dari partisipasinya adalah kebaikan untuk orang banyak.

Hal yang juga tak kalah penting adalah *political trust*. Dengan kepercayaan semacam ini maka warga negara bisa berpartisipasi dalam kehidupan politik untuk menyampaikan informasi mengenai kebutuhan dan preferensi mereka kepada para pengambil keputusan politik. Perlu dicatat, hal yang membahayakan dalam proses demokratisasi adalah, bukan semata karena informasi terlalu melimpah ruah ber-campur fitnah, namun juga ketika ada penyumbatan aspirasi karena kehilangan kepercayaan.

Inilah perjuangan semua pihak yang harus terus menerus dilakukan: merawat partisipasi warga. [Rob]

# 9 (SEMBILAN) PROGRAM MIKRO Reformasi Birokrasi

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tatalaksana
5. Penataan Manajemen SDM Aparatur
6. Penguatan Pengawasan
7. Penguatan Tatalaksana
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
9. Monitoring dan Evaluasi



“MELAYANI RAKYAT  
MENGUNAKAN HAL PILIHNYA”

TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU

# SEGENAP PIMPINAN DAN PEGAWAI KOMISI PEMILIHAN UMUM



*Mengucapkan*



Selamat Atas Dilantikannya  
**Ir. H. Joko Widodo**  
&  
**Drs. H. M. Jusuf Kalla**

Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia  
Periode 2014-2019



Hadar Nafis Gumay



Sigit Pamungkas



Arief Budiman



Husni Kamil Manik



Ferry Kurnia R



Ida Budhiati



Juri Ardiantoro